

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kajian Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut George (2010: 4) teknologi informasi mencakup semua peralatan yang mampu menangkap, menyimpan, memproses, mengganti dan menggunakan informasi. Alat yang dimaksud antara lain perangkat keras komputer seperti *mainframe* (komputer induk), server, *laptop* dan PDA (*personal digital assistant*).

Menurut Kadir dan Triwahyuni (2013: 10) teknologi informasi mempelajari bagaimana menggunakan peralatan elektronika terutama komputer yang kegiatannya berupa penyimpanan, analisis dan distribusi informasi. Informasi terdiri dari kata-kata, angka bilangan atau bisa dalam bentuk gambar. Selanjutnya Asmani (2011: 99) mendefinisikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai semua teknologi yang di dalamnya terdapat proses mengambil, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarkan dan kemudian menyajikan informasi.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan

suatu alat yang di dalamnya terdapat proses penyimpanan data, pemrograman, pengolahan, serta pendistribusian data melalui jaringan secara meluas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Teknologi informasi dan komunikasi juga terdiri dari dua komponen utama yaitu *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak). Perangkat keras komputer seperti komputer induk, *server*, *laptop*, PDA (*personal digital assistant*), serta bentuk gawai lainnya. Sedangkan perangkat lunak terdiri dari proses pemrograman, proses mengambil, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta mendistribusikan data, dalam kategori sederhana disebut aplikasi.

Teknologi informasi dapat bekerja secara utuh jika semua komponen yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak bekerja secara baik. Dalam artian perangkat keras tidak akan berguna tanpa perangkat lunak atau aplikasi di dalamnya begitu juga sebaliknya, sehingga untuk menjalankan proses komunikasi membutuhkan kedua komponen ini bekerja secara kompetibel dalam menjalankan perintah *user* (pemakai).

Gawai yang tergolong perangkat keras dalam teknologi informasi dan komunikasi. Gawai membutuhkan pemrograman atau aplikasi seperti media sosial, *web browsing*, *youtube* serta aplikasi lainnya untuk menjalankan fungsi sebagai media komunikasi secara maksimal. Sebagai alat teknologi informasi dan komunikasi jika salah satu komponen tidak terpenuhi, maka tidak akan bisa digunakan sebagai media komunikasi.

b. Gawai

Istilah gawai mengacu pada perangkat elektronik tanpa kabel (*portable*) yang dimiliki oleh ponsel, pemutar MP3, perangkat *game* atau perangkat lain yang memiliki kemampuan nirkabel (Gupta, Krishnamurthy, Majhi, dan Gupta, 2013: 362). Perangkat yang dapat digolongkan sebagai gawai antara lain *notebook*, *tablet*, *smartphone*, dan sebagainya.

Sebagai objek teknologi, gawai adalah alat, perangkat, dan semua dalam satu perangkat. Pertama, gawai adalah alat, sepotong mesin. Kedua, sebagai perangkat itu adalah objek teknologi yang dirancang untuk menghasilkan efek tertentu. Ketiga, sebagai alat yang diarahkan oleh aplikasi. Ini berarti menggunakannya sebagai alat untuk melakukan tugas. Hasil dari operasi perangkat adalah medialitas, dipahami sebagai integrasi dari ketiga aspek ini. Oleh karena itu, medialitas adalah proses peralatan yang menghasilkan efek yang muncul dalam aplikasi. Produk dari kinerja alat dan aplikasi ini beragam dan serbaguna dan memiliki berbagai jenis nilai guna (Verhoeff, 2009: 285-286).

Secara khusus gawai adalah objek genggam berukuran saku yang dirancang untuk individu, penggunaan sehari-hari. Statusnya terletak di suatu tempat antara alat praktis, objek yang menyenangkan, dan sepotong teknologi yang mengilap (Verhoeff, 2009: 285).

Istilah gawai pada awalnya batasan definisinya tidak jelas, bentuk dan fungsinya bermacam macam. Dalam sejarah, *gadget* / gawai berasal dari kata *gaget*, Gauthier dan cap nama Cie dalam salinan Patung Liberty, yang saat ini diragukan dan sumber mengusulkan penggantinya secara etimologi berasal dari bahasa Perancis *gachette*, the “*catch-piece of a mechanism*” (sebuah bagian dari mekanisme), atau *gagete*, yang diartikan sebagai alat atau instrumen kecil (Merrin, 2014: 1-2).

Namun di awal abad 19, gawai berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Gawai berhubungan dengan lingkup domestik, hal-hal baru dalam toko, pusat perbelanjaan, dan berbagai katalog, gawai cukup berhasil dalam menguasai kehidupan sehari-hari. Peningkatan gawai meluas hingga ke dalam kemampuan elektroniknya dibangun pijakan dalam hiburan pribadi dan komunikasi, yang dengan memusat pada media masa dan proses komputer di akhir abad 20 itu telah lengkap bagiannya dari fungsi khusus, alat yang berguna menjadi salah satu kategori yang paling penting dari objek teknik dan menjadi elektronik yang dibutuhkan mayoritas konsumen global. Saat ini yang terbaru adalah gawai digital yang memiliki jaringan, seperti *tablet*, *netbook*, ponsel, pemutar musik, pemutar media, *e-reader*, kamera, dan perangkat *game* menjadi pribadi, seluler dan di tersebar mana- mana (Merrin, 2014: 3).

Teknologi digital telah menyebabkan perubahan lain dalam sifat dan kapasitas gawai, sedangkan gawai era klasik ditargetkan pada pengguna tertentu (misalnya, wanita atau eksekutif) dan tempat-tempat

tertentu (misalnya dapur atau garasi), gawai digital bergerak dengan mudah di antara anggota keluarga (*tablet* kerja misalnya, dengan cepat menjadi mainan anak-anak). Memang, mobilitas ini sangat penting bagi keberhasilan mereka dibawa dalam kantong dan tas mereka mengubah kehidupan sehari-hari ke dalam lingkungan terhubung secara daring, dan memperluas pengaruh gawai ke setiap bidang. Sementara gawai klasik didefinisikan oleh fungsi *hyperspecialized*, gawai digital didefinisikan oleh *hyperfunctionality*. *Hyperspecialized* pemaknaan gawai sebagai sebuah perangkat yang eksklusif dan special yang tidak dimiliki orang secara massif, sedangkan *hyperfunctionality* adalah pemaknaan gawai sebagai sebuah alat yang memiliki fungsi yang beragam dalam satu perangkat.

Selain telepon, e-mail, dan SMS, *smartphone* memungkinkan saya untuk membaca buku, koran, majalah menonton video, TV, film mengakses situs jejaring sosial, ikuti berita, memutar musik, mendengarkan radio, mengakses semua gambar dan informasi, dan membeli barang secara daring. Sementara itu, berbagai aplikasi memungkinkan untuk mengikuti pola cuaca, melacak penerbangan pesawat, membuat surat wasiat, mengukur kinerja seksual saya (Merrin, 2014 : 15).

Sistem "integrasi vertikal" dalam perangkat gawai ini jauh melampaui apa pun yang diproduksi di era penyiaran, termasuk semua aspek individu dan penggunaannya. Integrasi ini juga mencakup tubuh

dan kebiasaan kita, kesenangan fisik kita dan penyerapan oleh *hyperfunctional* dan *hyperludic* (Merrin, 2014: 15). Menurut Williams & Sawyer (2011: 387-391) gawai memiliki beberapa fungsi yang memudahkan kerja manusia, seperti mengirim pesan teks, *download ringtones*, email (*elektronik mail*), akses internet, *photography*, *games*, radio dan musik, televisi dan video.

Berdasarkan berbagai definisi di atas gawai digital yang paling jelas berfungsi sebagai sarana integrasi dengan konsumen elektronik, tapi tidak seperti hubungan konsumen sebelumnya yang tidak melibatkan pengetahuan atau hubungan di luar titik penjualan. Gawai digital menggabungkan pengguna dalam serangkaian hubungan yang sedang berlangsung dan dipantau dengan perusahaan teknologi, dengan telepon sendiri atau penyedia layanan internet, dengan sistem operasi yang disetujui dan pemilik toko digital, dengan perusahaan yang memproduksi konten atau aplikasi yang diunduh, dengan perusahaan analitik yang tertanam dalam konten ini, dan dengan *platform*, *situs web*, dan layanan daring yang diakses, merekam interaksi, dan aktivitas seseorang.

Aktifitas dalam gawai digital begitu kompleks sebagai sebuah media integrasi yang menghubungkan berbagai pengguna dengan cakupan yang tak terbatas. Gawai sebagai perangkat komunikasi dapat menjadi sebuah media integrasi tidak terlepas dari sistem penghubung yang disebut internet. Internet menjadi system nirkabel yang menghubungkan perangkat gawai dengan perangkat lainnya dengan

bantuan aplikasi yang dimiliki perangkat gawai. Semua mekanisme itu terkonsep dan berkerja dalam system gawai digital yang digunakan sekarang.

c. Jenis – Jenis Gawai

1) *Notebook*

Komputer *notebook*, juga disebut komputer *laptop*, adalah *portable* yang ringan komputer dengan monitor internal, *keyboard*, *hard disk drive*, *drive CD / DVD*, baterai, dan *Adaptor AC* yang bisa dicolokkan ke listrik dengan berat dari 1,8 sampai 9 Pon (Williams & Sawyer, 2011: 23). *Notebook* menjadi perangkat komputer yang lebih praktis dan mudah untuk dibawa serta digunakan daripada PC (*personal computer*). Melalui *notebook* seorang pengguna bisa menggunakan perangkat komputer kapan saja dan di mana saja, karena ukuran yang lebih kecil sehingga sangat praktis untuk dibawa.

2) *Tablet*

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, PC *tablet* adalah komputer *notebook* khusus yang dilengkapi dengan *tablet digitizer* dan *stylus* yang memungkinkan pengguna untuk menulis teks di tangan layar unit. *Stylus* dapat menggantikan *keyboard* ketika pengguna menggunakan panel input di layar atau ketuk huruf dan angka langsung di *keyboard* di layar. Perangkat portabel ini telah menemukan penggunaannya di beberapa sekolah untuk digunakan

siswa di kelas pada mata pelajaran seperti bahasa Inggris, bahasa asing, matematika, sains, dan penelitian sosial (Williams & Sawyer, 2011: 379).

3) *Smartphone*

Smartphone adalah ponsel seluler yang memiliki pemutar musik dan perekam video *built-in*, yang menjalankan aplikasi komputer dan mendukung aktivitas internet di luar email (Williams & Sawyer, 2011: 149). Definisi *smartphone* dari berbagai ahli sangat beragam karena tidak ada definisi baku mengenai *smartphone*.

Definisi *smartphone* merujuk pada telepon seluler yang memiliki kemampuan yang canggih, kecepatan data, serta efisiensi penggunaan energi. Istiyanto (2013 : 1) mencoba mendefinisikan *smartphone*, menurutnya *smartphone* dapat digolongkan sebagai sebuah wujud dari *ubicomp* (*ubiquitous computing*) yang memungkinkan manusia untuk dapat melakukan kegiatan *computing* atau berinteraksi dengan komputer dimana saja, sehingga proses komputasi dapat terintegrasi dengan berbagai aktifitas keseharian yang dilakukan manusia dengan jangkauan yang tidak dibatasi dalam satu wilayah (*scope area*). Menurut Putra (2017 : 69) *smartphone* merupakan suatu telepon genggam yang memiliki kemampuan cukup tinggi, kadang-kadang dengan fungsi

menyerupai perangkat komputer, sehingga dapat disimpulkan bahwa *smartphone* adalah suatu perangkat telekomunikasi canggih yang merupakan realisasi dari sistem *ubicomp* yang memiliki fungsi untuk membantu aktifitas manusia modern dengan kemampuan komunikasi nirkabel berkecapan tinggi.

d. Media Daring (Dalam Jaringan)

Media daring merupakan sebuah perangkat lunak yang membantu sistem kerja gawai sebagai sebagai perangkat keras dalam menjalankan fungsinya sebagai media komunikasi yang terintegrasi secara luas. Media daring menjadi substansi yang sangat penting yang membuat paradigma media massa bergeser pada paradigma media digital saat ini. Melalui media daring komunikasi diintegrasikan dalam sebuah sistem yang terpadu sehingga pengguna dapat berbagi berbagai informasi. Media daring sendiri memiliki berbagai penafsiran menurut beberapa ahli seperti berikut ini.

Menurut M.Romli (2012:34) Pengertian media daring secara umum adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto ,video dan suara, sebagai sarana komunikasi secara daring, sedangkan pengertian khusus media daring dimaknai sebagai sebuah media dalam konteks komunikasi massa. Menurut Santana (2005: 137) media daring merupakan sebuah jurnalisme baru karena memiliki fitur yang menyerupai jurnalisme tradisional

dengan kemampuan untuk menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita.

Menurut Martin (2014 : 189) media *mobile* telah mendapatkan tempat yang penting sebagai unsur komunikasi politik dan sebagai topik penelitian ilmiah. Media daring memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap perubahan mendasar dalam partisipasi politik, namun perlu memperhatikan bagaimana pola perilaku politik yang harus disesuaikan dengan bentuk penggunaan media *mobile* (Martin, 2014 : 189).

Menurut Yamamoto (2013 : 13) interaksi secara daring dalam bentuk opini politik membantu individu secara efektif mengekstrak informasi penting bagi partisipasi politik, sebagai orang-orang yang mengekspresikan pandangan politik secara daring sering cenderung mengantisipasi menggunakan informasi politik, seperti menggunakan berita untuk menulis posting blog, berbagi berita dengan jaringan mereka, dan bertukar pendapat dalam forum diskusi daring. Secara khusus, ekspresi politik secara daring ditemukan memiliki efek memobilisasi partisipasi politik untuk mereka yang menggunakan blog/ berita sosial/ forum dan aplikasi *mobile*, dengan mereka yang menggunakan media tradisional untuk memperoleh informasi politik, penggunaan media daring memiliki kecenderungan lebih baik untuk berpartisipasi dalam politik karena mereka juga sering mengungkapkan pandangan politik secara daring (Yamamoto, 2013 : 13).

Temuan lain yang penting menurut Yamamoto bahwa penggunaan aplikasi *mobile* untuk informasi politik memiliki efek independen pada partisipasi politik, yang konsisten dengan penelitian sebelumnya. Temuan ini tampaknya mendorong untuk proses demokrasi menjadi lebih baik, mengingat tren terbaru dari menggunakan aplikasi *mobile* disesuaikan untuk distribusi berita dan kampanye politik. Aplikasi *mobile* memungkinkan pengguna untuk secara efisien mendapatkan berita terbaru serta memantau secara daring, percakapan, *tweets*, berita daring, tentang peristiwa politik yang sedang berlangsung dan isu-isu diposting oleh media berita atau kampanye politik.

Dalam analisis lain media daring juga disebut sebagai *new media* atau media baru adalah media yang berbasis internet dan digunakan melalui komputer dan ponsel canggih. Penggabungan antara komunikasi satelit dengan pemanfaatan komputer menjadi kunci awalnya. Menurut Carey (Mcquail, 2011:43), keunggulannya sebagai suatu mesin komunikasi terletak pada proses digitalisasi yang memungkinkan segala bentuk informasi dibawa dengan efisien dan saling berbaaur.

New media disebut juga sebagai media digital. Media digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis *broadband optic cable*, satelit, dan sistem gelombang mikro (Flew, 2008:2-3). Menurut Flew (2008:2-3) Ciri-ciri utama internet sebagai media adalah, teknologi berbasis

komputer, karakteristiknya hibrida, tidak berdedikasi, fleksibel, potensi interaktif, fungsi publik dan privat, peraturan yang tidak ketat, saling terhubung, ada dimana-mana/tidak tergantung lokasi, dapat diakses individu sebagai komunikator, media komunikasi massa dan pribadi.

Melalui internet, surat kabar telah bisa diakses sebagai teks, dan pengguna bisa menjelejah kabar terbaru dari belahan dunia secara cepat. Salah satu konten yang sedang berkembang dan menjadi alasan menggunakan internet, adalah adanya media sosial. Kaplan dan Haenaen (McQuail, 2011: 151) mendefinisikan media sosial sebagai : “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas ideologi dan teknologi *web 2.0* dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user and generated content”. Terdapat perbedaan media baru dengan media lama menurut Poster dalam McQuail (2011: 151) adalah media baru tidak terbatas oleh percetakan dan modal penyiaran dan memungkinkan terjadinya percakapan antar banyak pihak, memungkinkan adanya penerimaan secara simultan, perubahan, dan penyebaran kembali obyek-obyek budaya, menghambat tindakan komunikasi akan pentingnya posisi hubungan antar wilayah dari modernitas, menyediakan obyek global secara instan, memasukan subyek modern atau akhir modern ke dalam mesin aparat yang berjaringan.

Perubahan teknologi yang begitu cepat menggeser eksistensi media, menuju (*new media*), konsep media baru yang merupakan media interaktif (internet) merupakan suatu lingkungan baru tempat manusia

saling berkomunikasi, menurut McManus (Severin & Tankard, 2014 : 4) media baru memiliki beberapa ciri lingkungan seperti, teknologi yang dahulu berbeda dan terpisah seperti percetakan dan penyiaran sekarang bergabung, pergeseran paradigm dari kelangkaan media menuju media yang melimpah (banyak), kita sedang mengalami dari pergeseran dari kepuasan massa audiens kolektif menuju kepuasan grup dan individu, pergeseran dari media satu arah menuju media interaktif.

Derasnya perkembangan sistem komunikasi dengan media interaktif (internet) sebagai ujung tombak dalam perubahan berbagai aspek kehidupan umat manusia. Perubahan ini telah membawa paradigma baru dalam hal komunikasi, kemudahan akses digital membuat komunikasi massa menyebar secara luas dan cepat yang membuat penggunaanya menjadi ketergantungan. Schrock (2006: 4) dalam *Dependency Theory* mendefinisikan bahwa ketergantungan berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan atau pencapaian tujuan dengan bergantung pada sumber daya lain, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan akan akses digital dilakukan oleh media – media daring seperti media sosial. Keberadaannya dianggap sebagai kekuatan sosial yang dominan. Sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Neil Postman, bahwa teknologi mendorong budaya *technopoly* yaitu suatu bentuk baru dari budaya dimana masyarakat yang ada di dalamnya mendewakan teknologi, sehingga membuat teknologi tersebut mengontrol semua aspek kehidupan sosial masyarakat (Straubhaar, 2010: 50).

Ketergantungan masyarakat pada teknologi komunikasi dan informasi yaitu media daring membuat paradigma dalam komunikasi politik dan sosialisasi politik bergeser pada bentuk – bentuk media tersebut, sehingga membuat aktor – aktor politik memanfaatkannya. Dari berbagai media termasuk media daring yang dianggap potensial untuk menaikkan popularitas aktor politik tertentu. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Wang (2009 : 55) pada komunitas kelas menengah cina, mayoritas responden memiliki minat yang kuat dalam isu-isu politik, tetapi komunikasi politik dengan negara terbatas karena media tradisional cenderung dikontrol oleh elit politik. Responden mengungkapkan bahwa mereka berpaling dari menggunakan media tradisional ke dalam bentuk media digital atau daring untuk membahas isu-isu politik dan mengekspresikan pandangan mereka dalam forum daring dan blogosphere, untuk meningkatkan partisipasi politik.

Namun media massa tradisional telah memperkuat perannya sebagai mediator antara negara dan warga negara dalam hal urusan publik dan politik. Meskipun internet cukup dibatasi penggunaannya namun mereka melihat internet sebagai tempat terbuka dan bebas bagi partisipasi politik dan diskusi. Mengingat bahwa penggunaan internet akan menyebar lebih jauh dikalangan remaja yang saat ini akan terus meningkatkan penggunaannya. Serta memiliki kemungkinan akan terus menjadi saluran komunikasi yang efektif publik dan politik untuk kelas menengah tumbuh (Wang, 2009 : 55).

Survei lain tentang penggunaan media daring di Cina juga menunjukkan kecenderungan yang sama, berita yang ada di internet memberikan reaksi emosional dan motivasi yang secara signifikan meningkatkan diskusi sipil. karena media daring jauh lebih sedikit dikendalikan oleh pemerintah Cina daripada media tradisional. Melalui internet, orang lebih cenderung memiliki beragam suara dan pendapat, dan memperoleh informasi yang berbeda dari propaganda pemerintah pada media massa, dan ketidaksamaan faktual mungkin akibatnya memicu emosi masyarakat, yang juga menemukan bahwa diskusi daring dan musyawarah bisa membangkitkan emosi *netizens*, kemarahan, *skeptisisme*, kesedihan atau simpati adalah emosi yang paling kuat yang bisa memobilisasi protes secara daring. Survei ini menunjukkan bahwa 70 persen dari pengguna internet Cina menggunakan internet mobile untuk mengakses liputan berita dan jaringan sosial pribadi dengan mudah, beralih antara ruang privat dan ruang publik, studi masa depan mungkin mengeksplorasi bagaimana penggunaan perangkat mobile menyediakan saluran yang berbeda untuk keterlibatan sipil (Zhi-Jin dan Xinzhi, 2017 : 41-43).

e. Pemanfaatan Gawai sebagai Media Daring

Gawai yang memiliki akses internet saat ini dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal sebagai berikut (Williams & Sawyer, 2011: 92-98), internet telepon & *videophone*, multimedia di *web*, *webcasting*, *blogging*, & *podcasting e-commerce: B2B commerce*, keuangan *online*, lelang, &

berburu pekerjaan, hubungan: situs-situs perhubungan, *web 2.0 & web sosial*: jejaring sosial, media berbagi, agregasi jaringan sosial, & *microblogging*.

Gawai dan internet tidak dapat dipisahkan dengan kecepatan penyebaran informasi melalui jaringan *nirkabel* telah membantu pengiriman pemerintah layanan yang lebih baik dan telah membuka jalan untuk membuat operasi pemerintah lebih transparan kepada publik (Williams & Sawyer, 2011: 10). Gawai dengan jaringan internet dapat sifat politik, memungkinkan kandidat politik dan kelompok kepentingan politik untuk terhubung dengan pemilih dengan cara-cara baru, untuk mengumpulkan uang dari beberapa donor kecil, bukan hanya kucing gemuk yang kaya, dan (menggunakan ponsel dan pesan teks) untuk mengatur protes jalanan (Williams & Sawyer, 2011: 10).

Penggunaan *smartphone* tidak lagi hanya untuk fungsi dasar; bahkan untuk pengguna lansia. Saat ini komunikasi (*Viber, WhatsApp*) dan aplikasi media sosial (misalnya, *Facebook, Twitter*) adalah kegunaan paling populer di antara para peserta (Salman, Ahmad dan Sulaiman, 2017: 159). Situs *web* menjadi lebih mudah digunakan, mereka memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan lebih baik kekuatan kolektif orang, yang telah menyebabkan "jejaring sosial" atau "sosial media," tidak hanya melibatkan blog dan wiki (untuk berbagi informasi) tetapi juga jaringan sosial dan berbagi media. Tema umum dari semua ini adalah interaksi manusia melalui beberapa sosial media sebagai berikut

(Williams & Sawyer, 2011: 98-100), *Myspace*, *Facebook*, & Situs *Web Sosial Networking* merupakan jaringan sosial situs *web* adalah komunitas daring yang memungkinkan anggota untuk menjaga melacak teman-teman mereka dan berbagi foto, video, musik, cerita, dan ide dengan anggota terdaftar lainnya. Selanjutnya *Youtube*, *Flickr*, & situs berbagi media lain yang digunakan anggotanya untuk berbagi media seperti foto, video, dan musik. Serta aplikasi media sosial lainnya seperti *Friendfeed*, *Spokeo*, *Agregator*, *Twitter* & *Tumblr* Jaringan Sosial & Layanan *Microblogging* yang digunakan untuk melakukan "*thoughtcasting*" atau "*microblogging*" kirim pesan teks dari ponsel, yang akan diterima teman *web* / IM atau di ponsel mereka. Fenomena ini disebut *microblogging*, karena pesan harus pendek, 140 karakter atau kurang, karena panjang pembatasan pada pesan teks. *Tumblr* memungkinkan pengguna mengekspresikan diri menggunakan beberapa media, tetapi dengan cara yang lebih mudah daripada menggunakan perangkat lunak blog tradisional.

Pada awalnya penciptaan media sosial ditujukan untuk menghubungkan individu secara pribadi dengan individu lain atau kelompok yang terpisahkan secara fisik dengan jarak yang jauh agar dapat membantu mereka untuk saling berbagi ide, gagasan, dan pengalaman, (Kaplan, 2010: 60). Ketika individu mengalami kesulitan untuk berkomunikasi internet hadir sebagai solusi, karena aktivitas daring dapat memperluas dan memperkuat jaringan sosial mereka (Smahel, 2012: 2).

Namun internet dan media sosial dapat membuat penggunanya menjadi kecanduan. Para ahli menilai bahwa seseorang mengalami kecanduan atau ketergantungan pada *internet* disebabkan rasa cemas yang dimiliki oleh individu (Young, 2011: 39).

Menurut Littlejohn (2009 : 413-414) interaksi sosial melalui media sosial menciptakan pemahaman baru mengenai komunikasi pribadi yang interaktif. Media sosial tidak seperti interaksi secara langsung (*face to face*), akan tetapi memberikan bentuk interaksi baru yang membawa penggunanya kembali pada hubungan *interpersonal*. Hubungan interpersonal ini digambarkan dalam bentuk interaksi termediasi atau disebut dengan *Computer Mediated Communication* (CMC). Melalui media sosial, individu satu sama lain dapat berinteraksi secara *realtime*. Banyak keuntungan yang diperoleh individu melalui interaksi yang dilakukan dengan menggunakan media sosial namun harus disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak hanyut di dalamnya.

2. Kajian Tentang Komunikasi Politik

a. Pengertian Politik

Beveridge (2017 : 597) mendefinisikan politik ke dalam tiga dimensi pokok yaitu, politik sebagai tata negara dan lembaga pemerintahan, politik sebagai sebuah pilihan dan kontingensi, politik sebagai keterlibatan aparat dan pembentukan konsensus. Menurut Rod Hague (Budiardjo, 2015: 16) “politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana suatu kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.

Menurut Roger F. Soltau (Jurdi, 2014:15) ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan negara dengan warga negaranya dan negara-negara lain. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa politik adalah suatu kegiatan atau cara untuk mendapatkan kekuasaan dalam suatu sistem kenegaraan, serta pengaturan warga negara dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan.

b. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan sebuah unsur yang menjembatani dua subjek utama yaitu komunikator politik dan komunikan, komunikasi politik menjadi unsur yang sangat penting untuk melihat kesehatan politik suatu negara karena melalui komunikasi politik hubungan antara pemerintah dan warga negara terbangun. Sebelum mendefinisikan komunikasi politik perlu mengkaji apa itu definisi dari komunikasi.

Menurut Fabun (1968 : 15) komunikasi adalah suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni secara personal kemudian dibagikan kepada orang lain. Komunikasi juga didefinisikan sebagai suatu pengalihan informasi dari seorang individu atau kelompok kepada orang

lain, terutama dengan menggunakan symbol (Theodorson & Theodorson, 1969 : 62).

Lasswell (Putra, 2017 : 38) mendefinisikan komunikasi menjadi lebih kompleks. Komunikasi dijabarkan dari proses awal terjadinya hingga akibat dari komunikasi tersebut, sehingga komunikasi didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang mampu menjelaskan mengenai semua komponen interaksi, mulai dari siapa, kepada siapa, yang mengatakan apa, dengan saluran atau media apa serta apa akibat dari proses interaksi tersebut.

Menurut Carey (Baran, 2012 : 9) komunikasi adalah proses simbolis dimana realitas diproduksi, dijaga, diperbaiki, dan ditransformasikan. Carry mengungkapkan bahwa komunikasi memiliki hubungan dengan realitas, komunikasi merupakan proses yang melekat pada kehidupan sehari – hari seorang manusia yang menginformasikan bagaimana menangkap, memahami, dan mengonstruksi pandangan kita terhadap realitas dan dunia.

Berdasarkan asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi atau data yang menghubungkan antara individu dengan individu lain dengan media tertentu sehingga terjadi proses transfer informasi yang berguna dan memberikan hasil tertentu. Dari definisi tersebut komunikasi memiliki

beberapa unsur agar dapat terlaksana yaitu : sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, umpan balik (*feedback*).

Komunikasi berguna untuk menyapaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk membuat suatu opini baru. Dalam politik komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai politik untuk memberikan pemahaman politik kepada warga negara. Deutsch (Rush & Althoff, 2008 : 253) mendefinisikan komunikasi politik sebagai sebuah proses penyaluran informasi tentang politik dari bagian yang satu ke bagian yang lain dalam sebuah sistem politik. Proses ini merupakan sebuah mekanisme yang sangat dinamis terus menerus berubah dan sulit ditebak dalam sistem perpolitikan di suatu negara. Menurut Mc.Nair (2003:3) komunikasi politik sebagai diskusi murni tentang alokasi sumber daya publik (pendapatan), otoritas resmi (siapa yang diberi kekuatan untuk membuat hukum, legislatif dan keputusan eksekutif, dan sanksi resmi.

Definisi komunikasi politik yang diberikan oleh Sitepu (2012: 170) lebih kompleks mencakup aspek yang sangat luas dalam sebuah proses politik suatu negara. Sitepu (2012 : 170) mengemukakan bahwa komunikasi politik merupakan proses pengalihan pesan berupa data, informasi atau citra, yang mengandung maksud atau pesan tertentu dari seorang komunikator kepada komunikan yang melibatkan suatu proses pemaknaan terhadap kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintah, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan, pengambilan

keputusan, dan pembagian. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik adalah sebuah proses transmisi informasi dari seorang komunikator kepada komunikan untuk melakukan sebuah pemaknaan tertentu terhadap unsur – unsur dalam tertentu dalam sebuah sistem politik.

Metag (2016 : 198) mengungkapkan bahwa komunikasi politik sangat penting untuk pembentukan pendapat tentang segala jenis masalah politik, proses komunikasi dan pembentukan pendapat tersebut berada di tingkat lokal maupun nasional. Komunikasi politik menjadi unsur yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara, untuk mempertahankan ideologi politik yang sedang berlangsung. Komunikasi politik merupakan alat untuk menjaga stabilitas sebuah sistem politik, jika komunikasi politik dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan pemaknaan yang positif dari sebuah sistem politik karena melalui komunikasi politik, nilai–nilai politik dari sebuah negara dapat tersalurkan dengan baik kepada warga negara, sehingga warga negara dapat memiliki pemahaman yang baik mengenai politik negaranya.

Dalam komunikasi politik, sesungguhnya setiap aspek memiliki peran tersendiri, walaupun tetap memiliki hubungan secara langsung ataupun tidak langsung dalam aplikasinya. Lima komponen dalam komunikasi politik tersebut menyangkut komunikator politik, pesan politik, media yang digunakan dalam komunikasi politik, khalayak

komunikasi politik, dan akibat yang ditimbulkan dari komunikasi dalam politik (Nimmo, 2011: 114).

Komunikasi politik menjadi unsur yang paling sering disoroti dan diperhatikan karena hubungan antara negara dan warga negara ditentukan dari berjalannya sebuah komunikasi politik. Komunikasi politik menjadi sebuah jembatan penghubung antara kedua elemen penting ini, melalui komunikasi politik warga negara dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan dalam sebuah negara, karena itu merupakan hak dari warga negara.

Menurut Damsar (2015 : 210 – 215) komunikasi politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, yang pertama adalah fungsi informasi, melalui komunikasi politik informasi atau pesan yang disampaikan oleh sumber atau pengirim (aktor politik atau partai politik) dapat diketahui, dikenal, atau diserap oleh penerima (masyarakat). Kedua fungsi pendidikan, melalui komunikasi politik proses pendidikan politik dari aktor politik terjadi, Seperti proses penyampaian ideologi (negara, partai politik, gerakan sosial), nilai (kebangsaan, patriotisme, nasionalisme). Ketiga fungsi instruksi, komunikasi politik menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi yang berupa perintah, larangan, kewajiban, atau anjuran kepada masyarakat. Keempat fungsi persuasi, merupakan fungsi komunikasi politik yang berhubungan dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga melakukan, melaksanakan atau mengubah persepsi sesuai kehendak pemberi pesan, hal ini sering terjadi

pada saat proses kampanye politik. Kelima fungsi hiburan, merupakan fungsi dari komunikasi politik yang ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat untuk merespon setiap informasi yang disampaikan, seperti dalam pelaksanaan kampanye politik sering diselingi dengan berbagai hiburan yang menarik.

Supaya fungsi dari komunikasi politik dapat berjalan dengan baik maka komunikasi politik harus memenuhi beberapa unsur. Unsur – unsur komunikasi politik menurut Cangara (2011 : 31 – 32) adalah komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target politik. Kesemua unsur tersebut harus dipahami secara utuh dan matang agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran bentuk serta unsur komunikasi politik. Unsur yang pertama komunikator politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Komunikator politik adalah mereka – mereka yang dapat memberi informasi mengandung makna atau bobot politik.

Unsur kedua pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang – terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Unsur ketiga saluran atau media politik merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan politik dari komunikator politik menuju komunikan politik. Media sangat berperan penting dalam komunikasi politik karena menentukan seberapa cepat dan akurat informasi tersebut

sampai kepada masyarakat. Unsur keempat sasaran atau target politik adalah anggota masyarakat yang diharapkan memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum.

Selain memiliki berbagai unsur atau komponen, komunikasi politik juga memiliki beberapa pendekatan dalam proses komunikasinya. Menurut (Nimmo, 2011 : 168) pendekatan dalam proses komunikasi yaitu komunikasi massa, komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi. Ketiga jenis pendekatan komunikasi politik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Komunikasi Interpersonal (antarpribadi)

Komunikasi antarpribadi menjadi memiliki peran penting dalam kehidupan sosial manusia karena pada kenyataannya komunikasi yang dilakukan secara tatap muka ini membuat menjadi lebih akrab satu sama lain. Menurut Mulyana (2014 : 81) komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang – orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap realsi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal.

Kunci keberhasilan dari komunikasi antar pribadi menjadi tanggung jawab dari peserta komunikasi. Kedekatan serta hubungan personal sangat berpengaruh untuk menentukan apakah pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami secara baik. Menurut

Morissan (2014 : 15) komunikasi intrapersonal terkait dengan komunikasi antara orang, yang biasanya dilakukan secara tatap muka dalam situasi yang pribadi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi adalah sebuah komunikasi yang dilakukan antara setiap orang secara langsung atau tatap muka, dan berhubungan dengan kepentingan pribadi. Komunikasi antar pribadi dilakukan oleh individu secara terus – menerus dalam proses sosialisasi. Komunikasi ini membantu individu dalam penemuan kebutuhannya baik secara sosial maupun psikologi.

2) Komunikasi Organisasi

Menurut Mulyana (2014 : 83) Komunikasi organisasi dibedakan menjadi dua macam yaitu komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang didasarkan pada struktur organisasi yakni komunikasi ke bawah, ke atas, dan komunikasi horizontal, sebagai contoh komunikasi yang dilakukan antara pimpinan dan bawahan, sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antarsejawat (gossip atau perbincangan sehari – hari).

Menurut Morissan (2014 : 15) komunikasi organisasi terjadi pada jaringan kerja sama yang besar yang meliputi seluruh aspek baik komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. komunikasi

yang berlangsung antara individu dan kelompok dalam organisasi merupakan bagian penting dari organisasi dan berjalan secara terus – menerus sebagai sebuah proses. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Mulyana dan Morissan dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan komunikasi yang dilakukan secara kelompok atau didasarkan untuk tujuan kelompok. Komunikasi organisasi terbagi menjadi komunikasi formal dan informal, yang keduanya memiliki peran penting untuk menjaga eksistensi sebuah kelompok serta dalam rangka mewujudkan tujuan bersama.

Komunikasi tidak hanya sekedar menjadi alat atau insrtrumen untuk berinteraksi tetapi komunikasi merupakan medium yang telah menyebabkan terciptanya sebuah organisasi dank arena komunikasi bersifat dinamis maka organisasi yang ada sekarang merupakan gambaran singkat dari proses pembentukannya melalui komunikasi yang akan terus berkembang serta berevolusi secara terus – menerus.

3) Komunikasi Massa

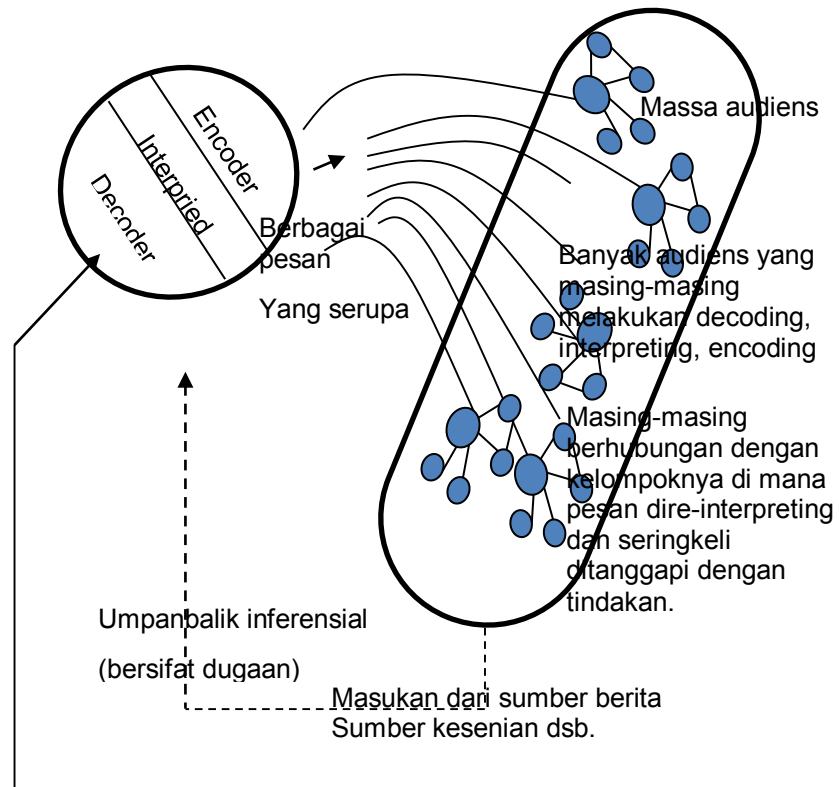
Kebutuhan masyarakat akan informasi dan berita – berita aktual sebagai sebuah konsumsi umum untuk menambah wawasan dan membuka pikiran individu terhadap dunial luar maka dibutuhkan sebuah mekanisme komunikasi yang luas untuk memenuhinya. Komunikasi massa merupakan jawabanya, namun bentuk komunikasi ini membutuhkan sebuah media yang mampu menyalurkan informasi

secara cepat, luas, dan efisien. Menurut Mulyana (2014 : 81) Komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (majalah, koran atau surat kabar) atau elektronik seperti (radio, televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga tertentu yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada sejumlah orang yang tersebar di berbagai tempat, anonim, heterogen dengan biaya yang relative mahal.

Kemunculan teknologi baru serta perubahan yang relative cepat dan besar membawa dampak pada teori komunikasi massa. Wright (Severin & Tankard, 2014 : 4) mengungkapkan bahwa komunikasi massa didefinisikan kedalam tiga ciri. Pertama komunikasi massa yang diarahkan kepada audience yang relative besar, heterogen dan anonym. Kedua pesan – pesan yang disebarkan secara umum melalui proses penjadwalan agar dapat mencapai sebanyak mungkin *audience* secara merata, serempak dan bersifat sementara. Ketiga komunikator beroperasi dalam sebuah mekanisme organisasi yang besar dan kompleks, yang mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar dalam proses penyampaian informasi.

Menurut Baran (2012 : 7) komunikasi massa adalah proses penciptaan makna bersama yang dilakukan antara media massa dan khalayaknya. Komunikasi massa memiliki perbedaan yang mencolok dengan model komunikasi lainnya. Sebagai contoh adalah model

komunikasi massa yang dikembangkan oleh Osgood dan Schramm
(Baran, 2012 : 7).



Gambar 1 Model Komunikasi Osgood Dan Schramm

Dalam model komunikasi yang dikembangkan oleh Osgood dan Schramm, menawarkan begitu banyak pesan yang identic berbeda dengan komunikasi intrapersonal. Dalam model komunikasi ini juga umpan balik digambarkan dengan garis putus – putus, dengan label umpan balik inferensial yang terlambat, umpan balik ini lebih bersifat tidak langsung.

Berdasarkan berbagai pemaknaan tentang komunikasi massa diatas, pada dasarnya komunikasi massa merupakan sebuah komunikasi yang disampaikan dengan cepat dan efisien dengan berbagai pesan yang dikemas secara menarik dan dibagikan untuk khalayak. Komunikasi massa membantu individu untuk memahami situasi sosial bahkan negara dengan berbagai informasi yang tersedia di dalamnya. Komunikasi massa juga menjadi sebuah media untuk mencerdaskan masyarakat, karena masyarakat akan lebih responsif terhadap situasi terkini yang sedang terjadi.

c. Media Komunikasi Politik

Manuel Castells (2001, 156) menegaskan bahwa politik kontemporer telah memasuki wilayah baru, dinamika politik baru tersebut yaitu ranah daring yang disebutnya "*informational politics*". Ranah politik yang baru ini dicirikan oleh peran signifikan dan penggunaan internet secara intensif. Alasan hadirnya fenomena baru dalam ranah politik ini adalah karena gawai dan internet menyediakan kanal komunikasi yang relatif murah, horisontal, tidak gampang dikontrol, dari orang ke orang menjadi banyak. Gawai dengan koneksi internet juga menyimpan potensi yang luar biasa sebagai wadah ekspresi hak warga negara, serta mengomunikasikan nilai-nilai manusia. Internet mendekatkan banyak orang dalam sebuah ruang publik, sehingga orang bisa menyuarakan keprihatinan sekaligus berbagi harapan" (Castells 2001: 157-164).

Menurut Karl Deutsch (Kaid, 2015 : 77) menyebutkan bahwa saluran komunikasi politik internal dan eksternal sebagai saraf pemerintah. Sistem politik tidak dapat berfungsi tanpa jaringan efektif saluran-saluran yang mampu mengirimkan pesan politik yang dikirim secara elektronik dan menyebar secara global.

Penggunaan media oleh tokoh politik dan partai politik dikenal dengan istilah komunikasi politik. Komunikasi politik mencakup penggunaan media oleh pemerintah dan partai politik guna mendapat dukungan pada saat pemilihan umum atau juga di luar pemilihan umum (Riaz: 2010:2). Komunikasi politik merupakan proses pengalihan informasi dari komunikator politik menuju komunikan politik, agar proses pengalihan informasi menjadi efektif atau efisien maka dibutuhkan saluran atau media sebagai perantara untuk menyampaikan informasi politik. Media digunakan untuk mempermudah sebuah proses komunikasi. Sitepu (2012 : 167) mendefinisikan media sebagai sebuah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan, dapat berupa saluran pribadi, media kelompok dan media massa.

Definisi media komunikasi juga disamakan dengan saluran komunikasi. Nimmo (2011 : 166) mendefinisikan saluran komunikasi sebagai alat atau sarana yang dapat memudahkan dalam penyampaian sebuah pesan. Berdasarkan definisi beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa media komunikasi politik merupakan sebuah alat

atau sarana yang digunakan untuk mempermudah proses penyampaian pesan tentang informasi politik atau objek politik dari komunikator (pemberi pesan) kepada komunikan (penerima pesan). Dampak perkembangan dan kemajuan ICT terhadap sosialisai dan komunikasi politik menurut Bryan (Faulks, 2010 : 247-248) sebagai berikut. Pertama ICT berguna untuk meningkatkan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran akan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dengan semakin banyaknya lembaga pemerintah yang menggunakan *e-mail* atau *website* sehingga memudahkan warga negara untuk mengakses informasi. Kedua Informasi dapat mengalir dengan cepat dan lebih mudah dari pemerintah menuju warga negara atau sebaliknya, ICT menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan warga negara untuk saling berkomunikasi sehingga tercipta stabilitas politik yang baik.

Ketiga ICT dapat meningkatkan potensi warga negara untuk berkumpul dan bersosialisasi serta mempublikasikan diri menjadi lebih mudah dan murah sehingga memudahkan melakukan perekrutan anggota atau menjaring opini masyarakat sebagai bentuk dukungan atau menolak suatu kebijakan pemerintah. Keempat Sifat interaktif yang dimiliki ICT akan akan melepaskan warga negara dari ketergantungan terhadap media massa, dengan ICT akan menciptakan transparansi pemerintahan yang lebih baik karena warga negara dapat mengakses dokumen pemerintah secara lengkap bukan hanya sekedar menerima

hasil editan dari media massa. Kelima ICT juga sangat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial yang efektif mengenai sasaran (masyarakat yang membutuhkan bantuan. ICT membantu efisiensi dalam mengidentifikasi kemiskinan atau sejenisnya dengan melakukan survei statistik mengenai hal tersebut.

Penggunaan media dalam proses komunikasi politik dan bentuk aplikasi komunikasi politik seperti retorika, agitasi, propaganda, kampanye politik tidak secara langsung berdampak pada perilaku politik warganegara namun hal itu akan cenderung mempengaruhi warga negara dalam mengorganisasikan citra politik (Arifin, 2011 : 157). Media pada prinsipnya adalah alat untuk mentransfer gagasan manusia, dalam hal ini media dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu, (Arifin, 2011 : 158).

Pertama adalah media yang menyalurkan ucapan, merupakan media yang hanya menyalurkan ucapan, bunyi, getaran dan hanya dapat ditangkap menggunakan telinga (*the auditive media*). Penggunaan media ini juga dapat memudahkan bagi penyandang cacat seperti tuna netra untuk tetap dapat mendapatkan informasi politik seperti warga negara lain pada umumnya. Contoh dari penggunaan *the auditive media* misalnya kentongan, telepon dan radio, yang digunakan sebagai saluran dalam proses komunikasi politik.

Kedua media yang menyalurkan tulisan, merupakan media yang hanya menyalurkan informasi melalui tulisan dan dapat ditangkap

melalui mata, disebut juga (*the visual media*). Media banyak digunakan para aktor politik untuk menyampaikan informasi politik melalui visualisasi gambar atau tulisan. Berbagai informasi dan gagasan mengenai ide – ide politik dapat tertuang secara nyata dan jelas melalui media ini dalam bentuk tulisan atau yang lainnya. Contoh dari media ini antara lain selebaran, pamphlet, poster, baliho, spanduk, surat kabar, majalah, buku, puisi dan karya – karya lain yang dapat divisualisasikan melalui mata.

Ketiga media yang menyalurkan gambar hidup, media ini merupakan gabungan antara *the auditive media* dan *the visual media* yaitu sebuah media yang dapat memvisualisasikan gambar dan tulisan sekaligus secara langsung, yang disebut dengan *the audio visual media*. Media ini menjadi alternative pilihan yang sering digunakan untuk menyampaikan informasi karena informasi politik dapat disampaikan dengan sangat menarik melalui media ini, sehingga dapat dengan mudah menarik perhatian khalayak politik. Penggunaan media ini akan sangat efisien dalam membentuk atau membuat opini public dan citra politik di dalam masyarakat karena kecenderungan manusia yang mudah tertarik dengan gabungan audio dan visual. Contoh media yang termasuk dalam bentuk ini adalah film, video, dan televisi yang mampu memuat gambar, tulisan dan bunyi secara bersamaan.

Selain klasifikasi diatas menurut Arifin (2011 : 159) media juga dibedakan menjadi beberapa bentuk seperti:

1) Media Antarpersonal

Komunikasi yang terjalin diantara individu dan individu lain memiliki kemungkinan tidak dapat dilakukan secara langsung, karena itu untuk tetap menjaga agar komunikasi dapat dilakukan dibutuhkan sebuah media yang dapat memfasilitasinya. Disinilah peran media antarpersonal hadir.

Menurut Arifin (2011 : 159) media antarpersonal merupakan media komunikasi yang digunakan untuk komunikasi antarpribadi seperti surat, telegram. Media antarpersonal digunakan apabila terjadi kendala dalam proses komunikasi antar pribadi, misalnya saja jarak yang membuat komunikasi tidak bisa terjadi secara tatap muka.

Media ini menjadi alternatif apabila seseorang tidak mau melakukan komunikasi secara langsung. Melalui Media antarpersonal komunikasi akan tetap terjaga walaupun terhalang oleh jarak atau aspek lainnya, sehingga seorang individu tetap dapat melakukan komunikasi melalui surat ataupun media lain. Namun media ini hanya menjangkau komunikasi antarpribadi saja tidak dapat digunakan sebagai alat komunikasi massa yang diperuntukkan untuk khalayak.

2) Media Massa

Menurut Muhtadi (1999 : 173) media massa merupakan alat bantu utama dalam proses komunikasi massa. Sebab komunikasi massa sendiri secara sederhana adalah suatu alat transmisi informasi

seperti koran, majalah, buku, film, radio dan televisi atau suatu kombinasi bentuk dari bentuk-bentuk media.

Merujuk pada penjelasan mengenai media komunikasi massa adalah media komunikasi massa yang merupakan produk dari pers yang menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat mengenai fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat (Djuroto, 2002 : 4).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media massa merupakan sebuah alat untuk menyebarkan informasi secara luas, cepat dan efisien kepada khalayak. Penyebaran informasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan khalayak terhadap informasi mengenai kerangka sosial, politik, teknologi, dan pemerintah. Alat bantu untuk menyebarkan informasi tersebut seperti, radio, televisi, majalah, Koran, buku dan media – media lain.

3) Media Interaktif

Melalui perkembangan teknologi muncullah media baru yang disebut dengan media interaktif yang memanfaatkan komputer, gawai dengan jaringan internet. Melalui internet sebagai media interaktif komunikasi politik dapat menyertakan jutaan orang diseluruh dunia tanpa adanya hubungan yang bersifat pribadi. Khalayak yang tercipta melalui proses ini sangat khas yaitu sebuah masyarakat yang terbentuk melalui jaringan komputer yang dikenal dengan masyarakat maya (*cyber space*).

Menurut Hrdinova (2010 : 2) media interaktif yang digunakan dengan mudah oleh karyawan dan masyarakat melalui gawai nya telah membentuk komunitas dan jaringan yang tetap, dan memudahkan interaktif melalui audio dan video tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Dengan kemudahan akses informasi tersebut mamaksimalkan peran media sebagai alat komunikasi politik pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, namun penggunaanya tetap harus melalui kontrol yang ketat agar berita yang diterima dapat dipertanggung jawabkan.

Manusia modern telah hidup didalam lingkungan yang berbeda seperti dahulu, sekarang manusia hidup di dalam lingkungan media baru. Keadaan ini membuat manusia menjadi sangat konsumtif terhadap informasi, manusia telah mengalami obesitas informasi yang membuatnya harus berpikir secara kritis untuk menyikapi semua informasi agar dapat mengendalikan arus teknologi informasi dan komunikasi. Untuk dapat mengontrol dan mengendalikan setiap informasi yang menyebar melauai medi intersktif seorang individu harus memiliki kemampuan melek media.

Menurut silverblatt (baran, 2012 : 35) mengidentifikasi terdapat elemen – elemen dasar melek media yang terdiri dari, keterampilan berpikir kritis memungkinkan anggota khalayak untuk mengembangkan penilaian yang independen terhadap isi media,

pemahaman terhadap proses – proses komunikasi massa, kesadaran terhadap dampak yang timbul dari media terhadap individu dan kelompok, strategi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendiskusikan pesan – pesan media, sebuah kesadaran bahwa isi media sebagai suatu teks yang menyediakan wawasan bagi kehidupan dan budaya, kemampuan untuk memahami, menghargai, dan menikmati isi media, mengembangkan keterampilan untuk memproduksi secara efektif dan bertanggung jawab, pemahaman akan kewajiban secara etis dan moralitas bagi para praktisi media.

Melalui kemampuan melek media diharapkan setiap individu mampu menyikapi secara baik informasi yang diterima melalui media, baik media massa atau media interaktif. Setiap individu harus mampu menganalisis dan mengkonfirmasi kebenaran dari setiap informasi yang diperolehnya. Supaya tidak terjadi penyebaran berita bohong yang meresahkan.

3. Kajian Tentang Literasi kewargaan

a. Literasi kewargaan

Menurut Milner (Dixson 2005 : 245) partisipasi politik negara Amerika sedang menurun, penguatan demokrasi sangat penting untuk tetapi mereka ingin melakukannya tidak melalui partisipasi tetapi melalui pengamatan dan analisis yang mendalam terhadap setiap aspek politik dan pemerintahan dengan meningkatkan kemelekkan warga negara atau literasi kewargaan. Negara demokrasi adalah negara yang mengutamakan

keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari sosial kemasyarakatan, politik sampai dengan pengambilan kebijakan. Keterlibatan warga negara menjadi aspek yang penting untuk mempertahankan sebuah negara demokrasi. Untuk tetap menjaga iklim positif dalam sebuah negara demokrasi setiap warga negara harus memiliki kemelekan warga negara (literasi kewargaan). Karena literasi kewargaan dibutuhkan untuk menumbuhkan dan menjaga partisipasi rakyat di dalam masyarakat yang demokratis (Zarnowski, 2009 : 57).

Flornes (2015 : 37) Literasi kewargaan memainkan peran kunci dalam pengembangan dan pemeliharaan masyarakat demokratis. Guru perlu memiliki keterampilan dan pemahaman dituntut untuk membantu anak-anak, sejak usia dini untuk termotivasi untuk mengambil bagian aktif dalam kegiatan demokratis di sekolah dan di masyarakat luas. Kompetensi media dan informasi adalah instrumen utama untuk pembangunan literasi kewargaan. Literasi kewargaan berfungsi sebagai landasan bagi demokrasi, hal ini dikarenakan sangat penting bagi individu dalam memahami peran mereka sebagai warga negara untuk memastikan demokrasi yang stabil dan kuat.

Budidaya literasi kewargaan di awal kehidupan adalah penting karena menetapkan dasar untuk partisipasi politik masa depan dan keterlibatan sebagai orang dewasa (Fudge & Skipworth, 2017 : 163). Menurut Fudge & Skipworth (2017 : 163) hal ini dikarenakan tidak mungkin warga negara akan terlibat dalam politik jika mereka belum

belajar bagaimana proses politik bekerja atau bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses tersebut. Proses sosialisasi politik yang dilakukan melalui komunikasi politik yang diperoleh individu akan menumbuhkan literasi kewargaan pada tingkat tertentu yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keterlibatan politik (*civic engagement*).

Pollack (2015 : 173) menggambarkan bahwa secara tradisional perspektif tentang melek kewarganegaraan melihat masyarakat hanya pada ranah permukaan di mana individu terlibat secara bebas dalam kegiatan sipil dan masyarakat sedangkan melek kewarganegaraan kritis mengakui peran ras, kelas, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, kemampuan-status dan bentuk lain dari identitas. Dalam kelompok sosial tertentu sering mengistimewakan beberapa orang sementara memarginalkan yang lain dalam partisipasi dalam ruang sipil. Melalui literasi kewarganegaraan kritis individu memeriksa masalah-masalah kekuasaan, hak istimewa, penindasan dan ketidakadilan sistemik sebagai komponen inti pembelajaran.

Literasi kewargaan yakni pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik, dan kenegaraan (Suryadi, 2010: 30). Konsep tersebut diperkuat oleh Dwipayana (2013: 3) dengan pernyataannya bahwa bahwa literasi kewargaan dimaknai sebagai kapasitas pengetahuan dan kemampuan warga negara untuk memahami dunia politik mereka, atau secara lebih luas diartikan sebagai kapasitas pengetahuan tentang bagaimana untuk secara aktif berpartisipasi dan

memulai perubahan dalam komunitas dan masyarakat yang lebih besar. Selanjutnya Helvoort (2019 : 97) mengungkapkan bahwa melek kewarganegaraan, menurut pendidikan merujuk pada dua kategori. Pertama adalah seseorang dengan keterampilan dan kemauan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Kedua pengetahuan dan keterampilan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang masalah yang berperan dalam lingkungan sosialnya.

Pertanyaan tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Milner (2002 : 1) bahwa literasi kewargaan merupakan pengetahuan dan kemampuan warga negara untuk memahami dunia politik mereka. Menurut Gaslton karakterisasi tersebut dapat disandingkan dengan pandangan bahwa *citizenship* mewakili kemauan dan kemampuan seseorang untuk terlibat dalam wacana publik dan mengevaluasi kinerja mereka yang menjabat, maka literasi kewarganegaraan adalah sumber pengasuhan kewarganegaraan yang demokratis (Mercea, 2015 : 191).

California State University Monterey Bay (CSUMB), juga memberikan definisi pada literasi kewargaan sebagai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang yang diperlukan warga negara untuk bekerja secara efektif dalam masyarakat yang beragam untuk menciptakan keadilan di tempat kerja, komunitas dan institusi sosial yang lebih baik (Bauerlein, 2012 : 329). Menurut Bauerlein (2012 : 330) untuk menciptakan komunitas dan institusi sosial diperlukan sebuah kurikulum pendidikan yang bebas (memberi ruang alternative untuk berekspresi)

yang akan menciptakan pendidikan politik yang sehat dan menghilangkan indoktrinasi politik. Hal ini akan membantu warga untuk menemukan identitas sipilnya masing – masing. Dalam hal ini identitas sipil adalah ketika seseorang melihat dirinya sebagai peserta aktif di masyarakat dengan komitmen dan tanggung jawab yang kuat untuk bekerja dengan orang lain menuju tujuan public (Bauerlein, 2012 : 329).

Literasi kewargaan sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dalam negara demokrasi karena melalui ini, setiap individu dan masyarakat akan sadar dengan tanggung jawabnya sebagai seorang warga negara. Untuk menanamkan literasi kewargaan diperlukan beberapa pengetahuan dasar, dalam hal ini Hart menjelaskan bahwa komponen pengetahuan tersebut adalah pengetahuan tentang hak-hak individu dan sosial tanggung jawab dan memiliki keterampilan untuk membuat keputusan yang mempromosikan keadilan sosial (Zarnowski, 2009 : 57). Selain pengetahuan individu yang memiliki literasi kewargaan menurut Chan dan Yap (Larrotta, 2016 : 52) mereka juga harus mampu menyumbangkan ide dan pendapat tentang masalah penting bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat di Indonesia milik mereka. Dengan cara menganalisis dan mengkritisi berbagai masalah seperti ekonomi, pelanggaran ham, kekurangan energi dan kesehatan.

Mueller & Jakubiak, C. (2014 : 46) literasi kewarganegaraan kritis ditujukan mempersiapkan remaja untuk secara strategismembangkitkan ranah sosial dan linguistic dalam sebuah pembelajaran. Maka, dalam

perspektif literasi kewarganegaraan yang kritis, individu dapat menggunakan keterampilannya untuk menginterogasi aparat pemerintah dalam setiap pembuatan kebijakan. Literasi kewargaan menjadi elemen dasar kebijakan politik warga negara atau disebut dengan *political virtue of citizenship* yang berbentuk pengetahuan politik warga negara pada khususnya dan diwujudkan dalam aktivitas kewarganegaraan (Suryadi, 2010: 29-30).

Milner (2002: 3) menawarkan sejumlah langkah yang mungkin untuk meingkatkan *civic literacy* seperti subsidi surat kabar, kegiatan informasi dari partai politik, dan dorongan dari penyiaran publik dan pendidikan kewarganegaraan. Salah satu paradigma yang dikembangkan dalam dunia pendidikan adalah *Civic Science Literacy (CSL)*, menurut Cronin and Messemer (2013 : 144) konsep CSL memisahkan dirinya dari literasi sains praktis dan keaksaraan sains budaya yang utama obyektif adalah pengembangan masyarakat yang ditempa pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk membuat keputusan ilmiah penting tentang kehidupan seseorang dan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi berpusat pada konten sains.

Paradigma tentang literasi kewargaan terus dikembangkan untuk menyongsong perkembangan dunia yang mengalami globalisasi diberbagai bidang terutama teknologi. Karena itu dibutuhkan masyarakat yang memiliki seperangkat keterampilan kewarganegaraan baru sehingga mereka peka untuk keanekaragaman, sadar akan peran hubungan

kekuasaan, dan terampil dalam komunikasi antar budaya (Pollack, 2013 : 232). Dengan didukung kompetensi pokok yang membentuk literasi kewargaan antara lain tanggung jawab pribadi, merawat orang lain dan masyarakat, serta kepemimpinan untuk mengambil tindakan positif yang berguna bagi kehidupan masyarakat , (Chi, Jastrzab & Melchior, 2006 : 6). Maka akan tercipta individu yang mampu mengintegrasikan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk menjamin kehidupan sosial yang demokratis.

Milner (2002:55) membagi dua unsur yang terdapat pada literasi kewargaan yaitu *factual knowledge* dan *cognitive proficiency*. Kedua unsur tersebut dapat digunakan sebagai sebuah indikator untuk mengukur tingkat literasi kewargaan pada individu atau warga negara. Dimensi dari *factual knowledge* (pengetahuan faktual) dari literasi kewargaan merujuk pada sebuah pengetahuan tentang sistem politik dan pemerintahan yang berlangsung dalam suatu negara. Berdasarkan hal tersebut dapat di kategorisasi bahwa yang termasuk kedalam pengetahuan faktual dari literasi kewargaan seperti, infrastruktur dan suprastruktur dalam pemerintahan, sejarah sebuah negara, HAM, sistem politik, sistem pemerintahan, konstitusi dan dasar negara. Indikator pengetahuan faktual dari literasi kewargaan dapat meluas pada fakta – fakta yang terjadi dilapangan dan daerah serta isu – isu yang sedang hangat dibicarakan. Selain itu indikator ini juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman pengetahuan individu terhadap semua proses perpolitikan, seperti pemilu

atau mekanisme lain yang ada dalam sebuah sistem politik dan pemerintahan.

Selanjutnya adalah dimensi *Cognitive Proficiency* (kecakapan kognitif) dari literasi kewargaan merujuk pada pengetahuan yang didapatkan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Berdasarkan hal tersebut kategori pengetahuan yang termasuk ke dalam *Cognitive Proficiency* seperti pengetahuan tentang ideology negara serta pengaruhnya terhadap kondisi politik, sosial, ekonomi, hukum dan lainnya dalam sebuah negara. Indikator ini masih dapat lebih diperdalam pada pengetahuan tentang isu – isu terkini dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan hukum seperti sumber daya alam, keadilan, kesejahteraan sosial, kerjasama ekonomi internasional, kebijakan – kebijakan negara, globalisasi, serta pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai bidang.

Uldam, J & Vestergaard (2015 : 3) juga memberikan sebuah konsepsi bahwa untuk memahami keterlibatan warga negara kita perlu mengeksplorasi hal – hal berikut, yaitu keterlibatan sipil yang beragam termasuk inisiatif yang berbasis masyarakat, partisipasi dalam ekstra-parlementer. Selanjutnya seputar masalah politik yang terkait dengan keadilan global, anti-kapitalisme, lingkungan, dan kesetaraan gender serta wacana tentang keterlibatan sipil sebagai sumber daya sukarela dalam penyediaan layanan sosial.

4) Kajian Tentang Budaya Politik

a. Pengertian Budaya Politik

Perilaku politik atau tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh warga negara adalah suatu kegiatan baik perorangan maupun kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan politik (pemerintah). Istilah perilaku politik dalam perkembangan selanjutnya sangat terkait dengan konsep budaya politik. Kedua konsep ini tidak bisa terpisahkan antara satu dengan lainnya. Namun sejatinya kedua konsep ini berbeda jika dipahami secara lebih luas. Perilaku politik lebih mengarah pada tindakan-tindakan yang disebabkan cara pandang individu atas sistem politik yang dilaksanakan dalam aktivitas berpolitik dia, sedangkan budaya politik lebih berkonotasi pada pelebagaan dari perilaku politik warga negara yang telah menyatu dalam aktivitas sosial dan politik.

Selama bertahun-tahun ilmu politik telah mengidentifikasi nilai-nilai inti demokrasi berikut, toleransi politik, penghargaan kebebasan dan kebebasan, kesadaran akan hak-hak sipil / politik, dan dukungan untuk politik pemilu yang kompetitif. Diasumsikan bahwa perkembangan demokrasi stabil dan efektif institusi sangat bergantung pada dukungan warga terhadap inti demokrasi nilai-nilai. Sulit membayangkan bagaimana institusi demokrasi akan bertahan dalam budaya politik di mana ada kurangnya dukungan serius untuk beberapa kunci nilai-nilai demokrasi, (Zhong, 2018 : 54).

Menurut Pye (Oktem, 2016 : 28) budaya politik adalah sejumlah tradisi suatu masyarakat seperti, semangat lembaga publik, antusiasme, ingatan kolektif, alasan warga negara, gaya dan kode operasi para pemimpinnya yang dikodifikasikan secara bermakna dalam pengalaman dan hubungan sejarah. Knowles (2015 : 13) budaya politik modern cenderung mengaitkan debat dengan badan-badan parlemen atau legislatif. Kemudian menurut Cogswell, Cust, & Lake (Knowles, 2015 : 8) budaya politik dapat dipahami sebagai sesuatu yang tertanam secara sosial, dimana ide-ide politik yang dilihat sebagai pelestarian elit dan diekspresikan melalui pernyataan publik eksplisit (traktat, risalah dari prinsip atau filosofi, atau catatan proses institusional, seperti sebagai debat parlemen), dibentuk kembali menjadi asumsi, kepercayaan, dan perilaku, seringkali hampir tidak diakui atau langsung diartikulasikan, yang memandu tindakan politik lintas kelas, jenis kelamin, dan agama yang berbeda afiliasi, serta geografis.

Menurut Kidwell (2008 : 20) negara dan budaya politik selalu berkaitan satu sama lain sehingga tidak akan ada budaya politik tanpa negara dan tidak ada negara tanpa budaya politik. Budaya politik tidak hanya menjelaskan diskursif tentang budaya politik saja tetapi juga tentang pembentukan negara sebagai salah satu deskripsi dari budaya politik, operasi kompleks diantara keduanya, dalam mengatur performativitas sistem politik suatu negara. Secara sederhana budaya politik didefinisikan sebagai sistem wacana autopoietic dari governmentality yang performative

mengatur kekuatan-pengetahuan matriks relasional antara negara, masyarakat, dan individu (Kidwell, 2008 : 21).

Budaya politik suatu bangsa yang lahir dari pemberontakan, seperti yang terjadi Amerika Serikat, budaya politik terbentuk dengan menyertakan perasaan antipemerintah yang kuat. Garry Wills mengidentifikasi skeptisisme atau rasa takut terhadap pemerintah sebagai elemen karakter nasional yang gigih sepanjang waktu seluruh sejarah Amerika Serikat (Feldman, 2017 : 2).

Menurut Shapiro (Munck, 2014 : 226) budaya politik digunakan sebagai cara untuk menggambarkan beragam struktur dan norma-norma dalam system kekuasaan seperti, mengatur, dan mengendalikan hubungan sosial di semua tingkatan dari pemerintahan, pengadilan, kekuatan pemilik lokal, hubungan patronase, dan bahkan keluarga dan organisasi rumah tangga. Ceresa. (2017 : 7) mengungkapkan bahwa budaya politik juga memberikan motivasi yang kuat sehingga lebih mudah bagi organisasi sipil untuk merekrut orang untuk berpartisipasi dalam sebuah sistem politik atau organisasi politik tertentu. Hal ini juga berarti peluang individu untuk memberi dan membentuk konteks budaya yang lebih besar dalam upaya menjaga dan mempertahankan sebuah budaya politik. Hal ini yang membuat budaya politik sangat penting untuk diteliti karena dapat mengungkap berbagai bentuk permasalahan politik dala suatu negara.

Dalam sebuah negara demokrasi, untuk menciptakan iklim budaya politik yang baik negara perlu menjaga orientasi politik warga negara untuk tetap baik (aktif/partisipatif). Karena negara demokrasi berdiri atas suara mayoritas yang menjadi kehendak rakyat. Inilah yang menyebabkan orientasi politik warga negara menjadi penting dalam negara demokrasi karena warga negara dituntut untuk ikut berperan aktif dan responsif dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, hal ini diperkuat dengan penelitian Almond dan Verba tahun 1969-1970 tentang budaya politik di lima negara yaitu : Jerman, Italia, Inggris, Meksiko, USA, bahwa budaya politik memperkuat sistem demokrasi dan negara–negara yang tidak mampu mengembangkan budaya politik dengan baik akan rentan terhadap otoritarianisme (Faulks, 2010 : 169).

Menurut Elkins & Simeon menawarkan konsep budaya politik yang lebih menjanjikan, yang menunjukkan bahwa budaya politik beroperasi untuk membatasi pilihan yang dibuat oleh pembuat kebijakan melalui penghapusan alternative kebijakan yang tidak sesuai budaya (Hamilton, 2013 : 155). Almond dan Verba merupakan ahli yang paling banyak mengkaji mengenai budaya politik, budaya politik didefinisikan sebagai sebuah pola – pola khusus yang mengarah pada orientasi dan tindakan politik, yang merupakan sebuah perangkat yang mendasari tindakan terhadap suatu sistem politik pemerintahan (Almond, 1956 : 396).

Dalam pandangan Almond dan Verba budaya sipil yang ditemukan di USA dan Inggris paling baik untuk berlangsungnya pemerintahan yang

stabil dan mapan, budaya politik di kedua negara tersebut dicirikan dengan rasa hormat warga negara kepada pemerintahan yang berkuasa, di samping keinginan untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam setiap proses politik di negara tersebut (Faulks, 2010 : 169). Menurut Tong (2019 : 2) terdapat dua poin penting dalam konsep budaya politik, pertama budaya politik tidak bertepatan dengan system politik yang diberikan atau masyarakat. Ke-dua, budaya politik tidak sama dengan budaya umum, meskipun antara budaya politik dan budaya umum saling berkaitan.

Parsons (Tong, 2019 : 2) secara eksplisit membagi system politik terkait erat dengan struktur politik (pola aksi politik) dan budaya politik (psikologis orientasi aksi politik) yang saling mempengaruhi, sehingga jika salah satu diabaikan akan mengarah pada pemahaman sepihak system politik. Pye (Tong, 2019 : 3) budaya politik sebagai seperangkat sikap, keyakinan dan emosi, menempatkan proses politik dalam rangka membuatnya bermakna, serta menetapkan asumsi dasar dan aturan untuk system politik agar dapat mengontrol perilaku dalam system.

Dimulai dengan makna ontologis budaya politik, dalam kombinasi dengan situasi umum penelitian tentang budaya politik Tiongkok, Dezhi Tong percaya bahwa politik budaya adalah aspek subjektif dari sistem politik. Dalam pengertian ini, membentuk suatu kontras dengan sistem politik: dari perspektif objektif, sistem politik rezim politik dan perangkat keras dari lembaga politik; dari perspektif subjektif, sistem politik adalah budaya politik dan perangkat lunak lembaga politik. Oleh karena itu, baik

psikologi politik resesif individu dan berteori konsepsi dan kesadaran politik tersistem dapat dimasukkan dalam kategori ini. Dari konsep ini, apa yang disebut budaya politik komparatif adalah perbandingan darik onsepsi subjektif dari sistem politik. Bahkan, konsep budaya politik paling awal diusulkan berdasarkan signifikansi politik komparatif (Tong, 2019 : 4).

Berdasarkan kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya politik merupakan sebuah orientasi yang mendasari tindakan dan sikap politik warga negara terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Dalam membangun sebuah iklim politik yang stabil dengan ditopang budaya politik yang baik, perlu dilakukan peningkatan kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan dengan melakukan transparansi dan pemerintahan yang bersih sehingga akan menciptakan suasana serta iklim politik yang positif. Budaya politik suatu bangsa merupakan sebuah bentuk orientasi kognitif, afektif dan evaluatif terhadap sistem politik yang menjadi dasar dalam melakukan tindakan–tindakan politik.

b. Pembentukan Budaya Politik

1) Melalui Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik mejadi elemen yang sangat dibutuhkan dalam mempromosikan serta melakukan pemahaman kepada masyarakat mengenai politik, melalui sosialisasi politik diharapkan masyarakat akan memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap politik yang ada disebuah negara. Definisi sosialisasi politik

menjadi sangat penting untuk menggambarkan proses sosialisasi politik berlangsung, sosialisasi politik digambarkan sebagai proses interaksi yang kompleks dalam sebuah negara. Jika dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Rahman (2007 : 245) bahwa sosialisasi politik adalah proses pemasyarakatan dalam semua aspek kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu definisi sosialisasi politik menurut Rush dan Althof (2008:25) merupakan suatu proses untuk memperkenalkan suatu sistem politik kepada seseorang serta bagaimana orang tersebut menentukan sikap dan tanggapan serta reaksi-reaksi tertentu terhadap gejala-gejala politik yang berlangsung.

Definisi mengenai sosialisasi politik menurut beberapa ahli masih sangat beragam tergantung dari sudut pandangnya, Easton dan Dannis (Rush dan Althof, 2008 : 34) mengemukakan pendapatnya bahwa sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik serta pola-pola tingkah laku yang ditunjukkan. Definisi ini sangat sederhana untuk menggambarkan makna dari sosialisasi politik tapi memiliki arti yang mendalam karena memfokuskan pada bagaimana orientasi dan tingkah laku politik dapat diperoleh seorang individu, yang menekankan pada proses untuk mencari dan mendapatkan informasi yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan politik bagi seorang individu. Dari beberapa definisi tersebut dapat

disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses yang berlangsung secara terus menerus untuk mendapatkan informasi tentang politik yang dapat mempengaruhi orientasi serta tindakan seorang individu terhadap fenomena politik yang terjadi.

Sosialisasi politik terjadi secara berkesinambungan terus-menerus sepanjang hidup yang memberikan pengaruh terhadap anak, remaja maupun orang dewasa mengenai persepsi tentang politik. Dalam proses ini tidak dapat dipastikan apakah setiap individu memperoleh pemahaman yang sama terhadap sebuah sistem politik. Akan tetapi individu mengalami perubahan secara berkala melalui pemahaman-pemahaman yang relevan yang diperolehnya dari interaksi antara sistem sosial dan sistem politik.

Menurut George (2013:61) penggunaan bahasa dalam melakukan sosialisasi dapat memperkaya subbidang sosialisasi politik, sedikitnya dua dalih. Pertama, menyediakan cara konkret menjelajahi mekanisme sikap politik, identitas, dan keterlibatan ditransfer atau tidak ditransfer dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Kedua, penggunaan bahasa dalam sosialisasi dipandang sebagai seumur hidup dan terus-menerus berlangsung, memungkinkan untuk melihat sosialisasi politik sebagai konstelasi yang sedang berlangsung untuk membentuk partisipasi politik.

Proses sosialisasi terjadi secara bertahap untuk mempengaruhi orientasi dan tingkah laku seseorang terhadap sistem politik. Le Vine (Rush dan Althof, 2008 : 38-39) membagi sosialisasi politik kedalam tiga tahap yaitu : imitasi, instruksi dan motivasi. Imitasi digambarkan sebagai sebuah proses peniruan yang dilakukan oleh individu, proses imitasi ini didominasi pada masa kanak-kanak namun tidak hanya dibatasi pada usia anak-anak karena baik remaja maupun orang dewasa juga melakukan proses imitasi yang telah dipengaruhi oleh proses intruksi dan motivasi. Tahap berikutnya adalah instruksi yang merupakan suatu proses penjelasan diri, dalam tahap ini difokuskan pada proses pembelajaran yang dilakukan individu baik secara formal (sekolah) maupun non formal (organisasi atau kelompok masyarakat). Melalui proses pembelajaran yang dilakukan individu diharapkan untuk memperoleh pengetahuan untuk mendukung tindakan serta tingkah laku yang akan dilakukan. Tahap berikutnya setelah kedua tahap sebelumnya adalah motivasi yang merupakan suatu bentuk tingkah laku yang tepat dari seorang individu yang diperoleh melalui proses uji coba dan kegagalan, tingkah laku ini disesuaikan dengan proses belajar dari pengalaman-pengalaman yang didapatkannya mengenai sikap dan tindakan yang sesuai dalam menyikapi suatu fenomena politik.

Proses sosialisai politik melalui tiga tahapan sosialisai politik mulai dari imitasi, instruksi dan motivasi terjadi secara terus-menerus

dan tidak berhenti selama seorang hidup. Tahapan–tahapan tersebut terus berlangsung dalam membentuk sikap politik seorang individu melalui pengalaman– pengalaman dan proses belajar serta informasi yang diperoleh secara berkesinambungan. Karena proses yang terus berlangsung mengakibatkan sikap dan tingkah laku politik seorang individu dapat berubah seiring dengan pengalaman dan informasi yang didapatkannya.

2) Orientasi Budaya Politik

Menurut Kidwell (2008 : 21) sistem analisis budaya politik tidak hanya menyelidiki apa tetapi bagaimana budaya politik, tidak hanya apa yang dicirikan oleh sikap, kepercayaan, atau asumsi budaya politik melainkan bagaimana budaya politik. Bahwa budaya politik merupakan autopoietic, sistem wacana performatif yang mengatur produksi pengetahuan politik, kinerja aksi politik, hubungan kekuasaan-pengetahuan, dan pemerintahan. menyarankan definisi budaya politik yang sederhana dan tepat.

Perez (2011 : 6) budaya politik juga memainkan peran penting dalam menentukan prospek demokratisasi. Sementara keyakinan dan perilaku elit dapat menentukan bentuk institusional dari rezim demokratis, sedangkan sikap massa adalah kunci untuk membangun stabilitas jangka panjang suatu rezim. Sulit untuk melihat caranya rezim demokratis yang stabil dapat dipertahankan tanpa jumlah yang

substansial warga mengungkapkan pandangan yang mendukung nilai-nilai demokrasi.

Menurut Apospori, Avlonitis & Zisouli (2010 : 127) tingkat pertumbuhan pendidikan, keterampilan kognitif serta akses media memberikan jalur yang cepat ke dalam berbagai sumber informasi. Media massa memainkan peran penting dalam mengubah dasar budaya politik individu, mewakili pergeseran dari politik loyalitas terhadap politik pilihan. Selain itu penyebabnya adalah faktor – factor dasar sosial yaitu, perubahan tingkat pendidikan dan akses ke media massa, proses ini diasumsikan lebih mempengaruhi generasi muda daripada generasi yang lebih tua. Apospori, Avlonitis & Zisouli (2010 : 127) menyimpulkan modernisasi sosial telah membentuk pola-pola budaya politik, melalui penelitian lebih lanjut diharapkan untuk menemukan perbedaan dalam budaya politik dan pola-pola perilaku pemilihan antara kaum muda dan orang tua.

Ketika melakukan analisis mengenai hubungan warga negara dengan sistem politik dan pemerintahan suatu negara, maka akan muncul pertanyaan bagaimana orientasi politik warga negara. Orientasi politik warga negara merupakan bentuk tindakan atau sikap warga negara terhadap sistem politik dalam sebuah negara. Orientasi politik setiap individu akan didasari pada pengalaman, pembelajaran dan informasi yang telah diterima. Hal ini yang menyebabkan setiap

orang akan memiliki orientasi politik yang berbeda-beda tergantung dari pengalaman dan informasi yang diterima.

Almond dan Verba (1984 : 16-17) membagi menganalisis ketiga bentuk orientasi tersebut yaitu sebagai berikut.

a) Orientasi kognitif

Orientasi kognitif merupakan pengetahuan, kesadaran warga negara terhadap sistem politik, objek-objek politik serta *input* politik (tuntutan warga negara) dan *output* politik (kebijakan atau peraturan). Pengetahuan tersebut meliputi lambang negara, kepala negara, mata uang, legislatif, eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, kelompok kepentingan, kebijakan.

Menurut Welch (1993 : 21) unsur-unsur kognitif budaya politik, terkait erat dengan tingkat pendidikan sehingga unsur kognitif budaya politik mudah untuk diajarkan. Komponen evaluative dan afektif kurang mudah untuk ditanamkan kepada warga negara terutama untuk negara-neagra yang tidak memiliki budaya kewargaan. Ide baru yang memperkenalkan kebutuhan identitas politik masuk akal dibentuk dari acara simbolik dan pemersatu, seperti revolusi, penbembangan untuk budaya politik. Hanya dalam hal ini, mereka menegaskan, komponen evaluatif dan afektif bidaya politik dibentuk.

Pendidikan terbukti paling berpengaruh terhadap budaya politik. Sifat budaya politik sangat besar ditentukan oleh distribusi pendidikan. Permasalahan gender merupakan factor penting yang lain, baik melalui tingkat partisipasi langsung oleh perempuan dan peran perempuan dalam sosialisasi. Perempuan yang kompeten secara politis, memiliki kesadaran dan aktif merupakan komponen penting dalam budaya politik.

b) Orientasi afektif

Orientasi afektif merupakan sebuah ikatan emosional serta sikap warga negara terhadap sebuah sistem politik. Hal ini berkaitan dengan sikap individu untuk mendukung atau menolak sebuah sistem politik, atau tanggapan warga negara terhadap aktor – aktor politik sebuah negara.

c) Orientasi evaluatif

Orientasi evaluatif merupakan keputusan, pendapan, serta tindakan nyata terhadap sistem politik yang melibatkan standar nilai, informasi atau pengetahuan dan perasaan seorang individu. Orientasi evaluatif merupakan tingkatan tertinggi dari sebuah orientasi budaya politik karena telah mencakup proses yang kompleks dari pemahaman yang baik terhadap sistem politik sehingga mampu membuat keputusan dan pendapat tentang objek – objek politik.

Xu1, Mar & Peterson (2013 : 1511) temuannya menawarkan wawasan baru bagaimana paparan budaya membantu sikap dan keyakinan bentuk masyarakat, paparan budaya tersebut seperti, buku cetak, film dan sejarah. Sebuah temuan yang mungkin sangat relevan mengingat bahwa kita sekarang hidup dalam waktu di mana media dan budaya menjadi semakin lebih umum dan dapat diakses.

Pengetahuan yang diperoleh dari peningkatan paparan budaya mungkin lebih mempengaruhi orientasi politik, sebagai informasi lebih lanjut cenderung untuk membawa peningkatan kompleksitas isu-isu utama dan menawarkan potensi untuk perubahan pendapat dan norma-norma. Mengingat bahwa paparan budaya dapat berdampak pada sikap dan keyakinan rakyat, dengan hubungan keterbukaan untuk pengalaman dan kepribadian yang sangat berpengaruh pada pembentukan orientasi politik (Xu1, Mar & Peterson, 2013 : 1498).

Melalui sikap dan orientasi politik yang beragam, maka akan terbentuk budaya politik yang beragam, yang dapat dilihat dari orientasi kognitif, afektif atau evaluatif yang paling dominan terdapat dalam suatu negara. Menurut Sheaffer & Shenhavv (2012 : 235) semakin besar kesesuaian antara nilai-nilai demokrasi individu dan tingkat demokrasi lembaga-lembaga politik di suatu negara, semakin besar stabilitas politik negara itu, dan sebaliknya.

Karena itulah penting untuk menjaga orientasi politik warga negara sejak dini yang akan berdampak pada perkembangan demokrasi dan iklim politik yang lebih baik dalam sebuah negara demokrasi.

3) Tipologi Budaya Politik

Chamberlain (2013 : 763) mengungkapkan tipologi budaya politik memungkinkan peneliti untuk dengan mudah mengklasifikasikan menyatakan itu memiliki pola pemukiman agama dan etnis yang serupa, dalam teori yang mengarah ke praktik politik tertentu, pandangan, dan kebijakan. Berbagai temuan di atas menunjukkan bahwa budaya politik tidak lagi memiliki efek substantif pada kemampuan eksternal. Mengingat konsepsi budaya politik di Amerika Serikat menekankan bahwa warga menempatkan nilai pemerintah yang berbeda dan bagaimana itu mencerminkan keinginan publik, penurunan signifikan dalam hubungan budaya dengan kemampuan eksternal lintas waktu memprihatinkan (Chamberlain, 2013 : 776).

Menurut Sitepu (2012 : 164) mengemukakan bahwa budaya politik terbagi menjadi tiga yaitu :

- a) Budaya politik parokial.

Budaya politik parokial terbentuk dari sikap dan orientasi warga negara yang didominasi oleh orientasi yang bersifat kognitif, dalam budaya politik ini terdapat dalam

masyarakat yang masih sederhana dan tradisional, yang masyarakatnya tidak tertarik dan menaruh minat terhadap sistem politik.

b) Budaya politik subjek.

Budaya politik subjek terbentuk dari sikap dan orientasi warga negara yang didominasi oleh orientasi yang bersifat afektif, dalam budaya politik subjek masyarakat menaruh minat, perhatian dan kesadaran terhadap sistem politik. Hal ini dapat terlihat dari sikap masyarakat yang memiliki pengetahuan serta kesadaran terhadap sistem politik tapi mereka bersikap pasif, karena menganggap mereka menganggap tidak memiliki kemampuan untuk merubah sistem, dengan hanya patuh terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan.

c) Budaya politik partisipatif.

Budaya politik partisipatif terbentuk dari sikap dan orientasi warga negara yang didominasi oleh orientasi evaluatif. Budaya politik ini sangat ideal karena masyarakat sudah ikut berpartisipasi dan berperan aktif untuk menjaga stabilitis sistem politik. Dalam masyarakat dengan budaya politik partisipatif mereka mengerti sebagai kedudukannya warga negara dengan memberikan perhatian pada sistem politik, mereka memiliki

kebanggaan dan keyakinan untuk dapat mempengaruhi setiap pengambilan keputusan atau kebijakan.

c. Partisipasi Politik

Dalam sebuah negara demokrasi yang baik, partisipasi menjadi indikator yang menjadi penilaian apakah negara berhasil menjalankan pemerintahan demokrasi dengan baik. Dengan terciptanya budaya politik yang baik diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi politik warga negara, karena partisipasi politik menjadi kunci sebuah demokrasi yang sehat. Apabila angka partisipasi politik rendah walaupun budaya politik warga negara dalam kategori baik hal tersebut tetap menjadi ancaman dalam sebuah negara dengan system politik demokrasi.

Beberapa ahli memiliki definisi yang serupa mengenai partisipasi politik. Jurdi (2014:217) menggambarkan partisipasi politik sebagai sebuah bentuk keikutsertaan warga negara dalam setiap proses politik yang terjadi dalam suatu negara, keikutsertaan warga negara harus dilakukan suka rela tanpa unsur paksaan. Dalam negara demokrasi partisipasi warga negara sangat erat dikaitkan dengan sistem pemilihan atau voting, namun tidak semua sistem politik memiliki bentuk pemilihan, hal ini yang membuat bentuk partisipasi politik setiap negara menjadi beragam.

Setiap negara memiliki bentuk yang berbeda – beda dalam partisipasi politiknya menyesuaikan sistem politik yang berlaku di

sebuah negara. Sistem politik yang berlaku dalam sebuah negara memiliki batasannya masing-masing mengenai bentuk partisipasi politik yang diperbolehkan dalam negara tersebut. Rush dan Althof (2008 : 129) mengemukakan bahwa beberapa sistem politik membatasi dan melarang bentuk-bentuk partisipasi politik seperti, mengemukakan pendapat di depan umum, demonstrasi, serta pelarangan pembentukan organisasi-organisasi politik karena dianggap akan mengganggu stabilitas dari sebuah negara.

Negara dengan sistem politik demokrasi memiliki bentuk partisipasi politik yang lebih beragam. Rush dan Althof (2008 : 122) mencoba menuliskan bentuk – bentuk partisipasi politik warga negara meskipun bentuk ini akan berlaku berbeda pada sistem politik tertentu yang memiliki batasan – batasan dalam partisipasi politik warga negaranya. Bentuk – bentuk partisipasi politik menurut Rush dan Althof (2008: 122) yaitu menduduki jabatan politik, mencari jabatan politik, keanggotaan aktif organisasi politik, keanggotaan pasif organisasi politik, keanggotaan aktif dan pasif organisasi semu politik, partisipasi dalam demonstrasi, partisipasi dalam diskusi politik, voting atau pemilihan umum.

Tidak dapat dipungkiri partisipasi politik dalam sebuah negara demokrasi menjadi hal yang sangat krusial. Melalui partisipasi politik sebuah pemerintahan dalam negara demokrasi dipertahankan, Namun Faulks (2010 : 231) berpendapat bahwa partisipasi politik dalam sebuah

negara demokrasi tidak hanya sekedar untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan melainkan sebagai suatu proses yang matang, yang tidak mengklaim suatu kebenaran secara sepihak tanpa melihat kebenaran yang disetujui warga negara secara konsensus (massal). Melalui partisipasi politik demokrasi lebih stabil karena memperluas tanggung jawab keputusan yang dibuat kepada setiap warga negara. Partisipasi yang tinggi akan meningkatkan standar dari kualitas keputusan yang dibuat, setiap warga negara juga akan memiliki rasa saling menghargai atas pendapat yang berbeda-beda karena keputusan yang terbentuk merupakan hasil konsensus dari suara mayoritas dan tidak bersifat otoriter.

B. Kajian Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang sedang dikembangkan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Penelitian Salman dan Saad (2015).

Penelitian ini relevan dengan variabel penggunaan gawai sebagai media komunikasi politik. Penelitian dengan judul “Online Political Participation: A Study of Youth Usage of New Media” dilakukan oleh Ali Salman dan Suhana Saad dari National University of Malaysia. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh dari penggunaan media baru terhadap tingkat partisipasi politik.

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrument kuisisioner dengan hasil bahwa 89% remaja di Malaysia adalah pengguna media sosial. Akan tetapi beberapa hal yang terkait dengan lingkungan politik, isu sosial masyarakat serta kontribusi dalam partisipasi politik masih sangat rendah, mereka cenderung memanfaatkan media sosial hanya sebatas hiburan dan jejaring sosial tanpa memperhatikan isu – isu terkini yang sedang berkembang.

Persamaan penelitian kedua penelitian ini adalah objek penelitiannya remaja, menggunakan instrument kuisisioner, dan metode survei untuk mengumpulkan data, sedangkan perbedaannya pada variabel literasi kewargaan dan orientasi budaya politik yang lebih luas dari variabel partisipasi politik.

2. Penelitian Kuswandi dan Syaefa (2013).

Penelitian ini relevan dengan variabel orientasi budaya politik. Penelitian yang dilakukan Aos Kuswandi dan Ali Syaefa pada tahun 2013, mahasiswa Universitas Islam “45” Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk sosialisai politik, hubungan antara sosialisai politik dan budaya politik serta memperoleh gambaran mengenai bentuk budaya politik pada pelaku UKM di kecamatan Mustikajaya.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, studi pustaka, dokumentasi, wawancara, dan penyebaran kuisisioner kepada sampel yang telah

dipilih mewakili populasi dengan menggunakan teknik sampling *cluster sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya intensitas Pelaku UKM dalam berhubungan dengan agen–agen sosialisai politik membawa pengaruh terhadap budaya politik yang ditunjukkan dengan tingginya angka partisipasi politik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akah dilakukan oleh peneliti adalah mencari faktor yang mempengaruhi budaya politik warga dan mencari gambaran tentang budaya politik yang terbentuk. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penambahan variabel gawai pada penelitian yang akan dilakukan, melihat bagaimana orientasi budaya politi yang dihasilkan mealui interaksi antara gawai , pendidikan politik, dan budaya politik, lokasi penelitian yang berbeda, serta penggunaan metode penelitian yang berbeda yaitu penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif saja.

3. Penelitian Sucipto (2014).

Penelitian ini relevan dengan variabel orientasi budaya politik. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Sucipto pada tahun 2014, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas kutai kartanegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk–bentuk budaya politik dari masyarakat Desa Sumber Sari dan melihat pengaruh yang ditimbulkan dari budaya politik tersebut terhadap partisipasi politik pada pemilu legislatif 2014.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, kepustakaan, *fiel work research* dengan teknik dokumentasi dan penyebaran kuisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk budaya politik masyarakat Desa Sumber Sari 64,95% (budaya politik subjek), 19,59% (budaya politik partisipan), dan sisanya 15,46% (budaya politik parokial), serta tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara bentuk budaya politik masyarakat sumber sari dengan partisipasi politik pada pemilihan Umum 2014.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mencari gambaran dari bentuk-bentuk budaya politik dalam masyarakat dan pola-pola sosialisai dari masing-masing budaya politik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penggunaan variabel gawai dalam mempengaruhi variabel pendidiakan politik dan orientasi budaya politik yang ditimbulkan dari variabel gawai.

4. Penelitian Kim dan Yang (2015).

Penelitian ini relevan dengan variabel literasi kewargaan. Penelitian Kim and Yang (2015 : 13 – 16) dengan hasil bahwa melek informasi internet adalah pendorong utama dalam mempromosikan kewarganegaraan remaja perilaku keterlibatan dengan memberdayakan mereka kemampuan untuk menyesuaikan potensi menyediakan media digital. Secara keseluruhan temuan menunjukkan itu seorang remaja yang secara kritis dapat memahami dan

efektif mengevaluasi informasi *online* lebih mungkin untuk menjadi aktif peserta sipil daripada orang yang tidak memiliki keterampilan seperti itu.

5. Penelitian Taveesin & Brown (2006).

Penelitian ini relevan dengan variabel Penelitian yang dilakukan oleh gawai sebagai media komunikasi politik. Penelitian Taveesin & Brown (2006 : 72 -74) menunjukkan hasil bahwa kemungkinan para pemilih secara aktif mengumpulkan pengetahuan politik dari televisi, iklan dan situs partai politik. Meski menggunakan televisi dan internet untuk tujuan politik tidak meningkatkan keterlibatan langsung dalam partai politik, namun mampu mempromosikan partisipasi dalam pemilihan nasional 2001 di Thailand. Situs web berita memiliki frekuensi tertinggi digunakan untuk komunikasi politik. Situs web ini menawarkan perspektif berita yang luas, termasuk berita tentang masalah sosial ekonomi serta politik di Thailand.

6. Penelitian Bell & Lewis (2015).

Penelitian ini relevan dengan variabel literasi kewargaan. Penelitian ini dilakukan oleh Bell & Lewis (2015 : 168) menunjukkan hasil bahwa terjadi peningkatan apatis politik yang dipengaruhi oleh penurunan literasi kewarganegaraan. Cara paling cepat menanganinya adalah dengan meningkatkan pendidikan kewarganegaraan, setengah dari responden (51,7%) mengidentifikasi simulasi politik sebagai aktivitas berdampak tinggi mempromosikan keterlibatan sipil tetapi tidak memasukkannya sebagai bagian dari program mereka. pendidikan telah menekankan pentingnya

menjadikan warga negara muda menghargai pengalaman demokratis dalam membina keterlibatan politik di masa depan.

7. Penelitian Pirannejad (2017).

Penelitian ini relevan dengan variabel gawai sebagai media komunikasi politik. Penelitian ini dilakukan dengan (Pirannejad 2017:7) menunjukkan hasil penggunaan internet sebagai media informasi komunikasi politik dapat mempengaruhi kesadaran politik melalui cara yaitu sebagai berikut, dengan menyediakan kapasitas digital, seperti lokakarya politik *online*, forum *online* dan debat politik, buku *online* dan jurnal *online*. Internet memfasilitasi komunikasi antar warga Negara melalui ruang *cyber* yang menghasilkan diskusi.

8. Penelitian Caliendo, Chod & Muck (2016).

Penelitian ini relevan dengan variabel literasi kewargaan. Penelitian ini dilakukan oleh Caliendo, Chod & Muck (2016 : 15) Penelitian ini berisi tentang apakah Twitter dapat digunakan sebagai alat pedagogis untuk membantu perkembangan keterlibatan sipil di kalangan mahasiswa. Mengingat sejauh mana milenium memanfaatkan dunia maya untuk membangun hubungan sosial dan mendapatkan informasi. Twitter memiliki kemampuan untuk menjadi mekanisme yang kuat untuk memelihara keterlibatan sipil. Temuan kami menyarankan itu, sementara Twitter sendiri tidak memiliki efek independen pada pengetahuan politik. Karena siswa yang mengambil kursus ilmu politik cenderung untuk berorientasi politik dan

mungkin sudah menggunakan jejaring sosial *online* dan situs microblogging untuk aktivitas politik, menggunakan Twitter di ruang kelas adalah cara untuk mengasah komitmen kewarganegaraan mereka dan untuk mendorong orang lain dalam komunitas kelas mereka untuk melakukannya sama. Kami memberikan bukti bahwa siswa senang menggunakan Twitter dan merasakannya meningkatkan minat mereka dalam politik, kebijakan publik, dan / atau ilmu politik. Secara anekdot, seorang siswa mencatat bahwa menggunakan Twitter memang membantunya belajar dan terlibat apa yang sedang terjadi di pemerintahan.

9. Penelitian Ding (2015).

Penelitian ini relevan dengan variabel gawai sebagai media komunikasi politik. Penelitian ini dilakukan oleh Ding (2015 : 17-18) penelitian ini tentang revolusi informasi China, mempopulerkan informasi dengan cepat dan teknologi komunikasi (TIK) pada intinya, telah membawa dua hal penting perubahan pada hubungan negara-masyarakat di negara tersebut. Pertama, difusi pemikiran yang terampil melalui TIK dan keterbukaan informasi yang dihasilkan telah menyebabkan desentralisasi informasi dan diversifikasi opini publik dalam masyarakat Cina. Kedua, cerdas penanganan komunikasi melalui TIK telah mengubah organisasi dan bentuknya mobilisasi politik dan partisipasi dalam politik Tiongkok. Ada dua skenario di mana Revolusi informasi Tiongkok dapat memfasilitasi gerakan negara menuju demokratisasi masa depan. Pertama, jika masyarakat sipil Tiongkok terus berkembang dan TIK Cina menjadi lebih baik dimobilisasi dan

terorganisir, masyarakat Tiongkok akan dapat melepaskan diri dari dominasi negara otoriter. Kedua, jika pemerintah Cina terus menjadi lebih tercerahkan di tengah modernisasi ekonomi dan revolusi informasi seperti yang diprediksi Huntington (1968) dalam tesisnya tentang tatanan politik, pemerintahan otoriter yang tercerahkan akan membuat politik perlu melakukan penyesuaian untuk menyalurkan dan menanggapi pembangunan ekonomi yang dipicu perubahan sosial dan politik. Dalam skenario mana pun, Cina mungkin memiliki masa depan yang menjanjikan demokrasi di jalurnya menuju modernisasi.

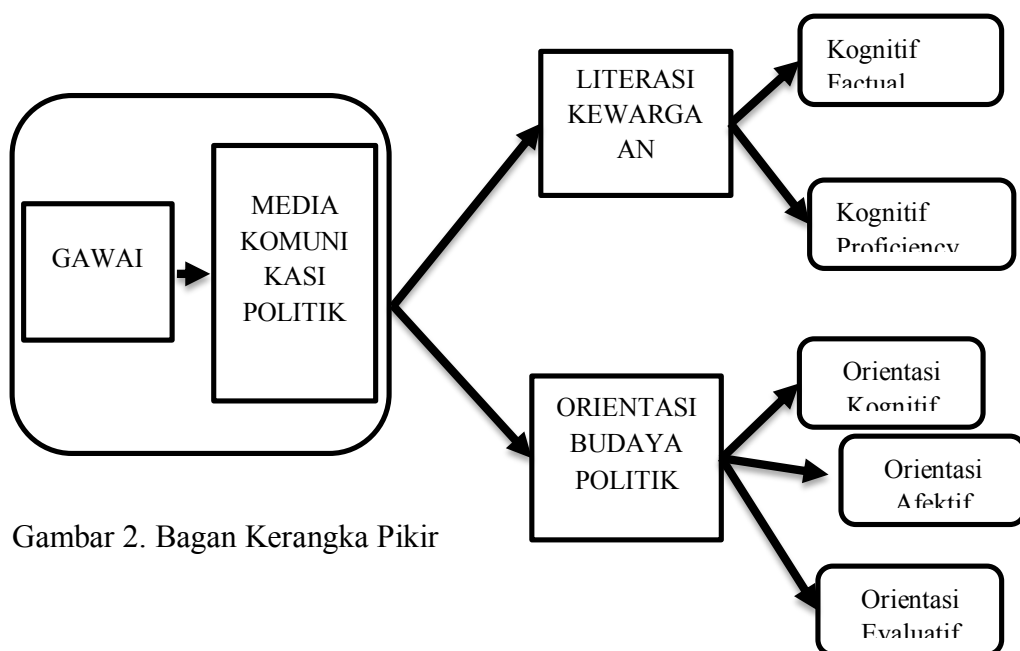
C. Kerangka Pikir

Gawai merupakan perangkat canggih yang membantu manusia modern dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Gawai telah menjadi kebutuhan pokok manusia modern, yang selalu menemani setiap aktifitas yang dilakukan oleh individu. Gawai sebagai teknologi informasi dan komunikasi memiliki berbagai dampak positif dan negatif bagi manusia.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari gawai adalah mudahnya akses informasi yang tersedia di berbagai situs atau sosial media yang masih diragukan tingkat kebenarannya karena setiap orang bebas mengupload informasi tanpa dibekali data dan sumber yang akurat. Banyaknya berita *hoax* ini menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas sebuah negara, karena akan menimbulkan kekacauan dan kecurigaan antara individu. Untuk mampu mengatasi penyebaran *hoax* individu harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi setiap isu – isu yang beredar,

kemampuan itu dalah literasi kewargaan. Melalui penguatan literasi kewargaan setiap warga negara akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai dunia politik yang dapat digunakan untuk keterlibatan dalam masyarakat (*civic engagement*).

Namun gawai juga memiliki dampak positif yang sangat banyak, salah satunya adalah akses informasi yang sangat cepat berguna sebagai media komunikasi politik yang efisien sehingga informasi mengenai politik dapat dengan cepat diterima oleh warga negara yang membantu dalam memberikan sosialisasi politik dan pendidikan politik informal. Melalui peran gawai dalam membantu pendidikan politik menjadi sumber informasi yang cepat diharapkan akan memberikan pengaruh dalam pembentukan budaya politik pada remaja, sebagai agen politik bangsa dimasa depan. Kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori yang telah dijabarkan serta kerangka pikir yang telah dibuat, maka penulis menuliskan hipotesis sementara dari penelitian yang akan dilakukan mengenai pengaruh gawai sebagai pendidikan politik dalam pembentukan orientasi budaya politik siswa, yaitu sebagai berikut.

H_1 = Ada pengaruh antara penggunaan gawai sebagai media komunikasi politik terhadap literasi kewargaan siswa.

H_2 = Ada pengaruh antara penggunaan gawai sebagai media komunikasi politik terhadap orientasi budaya politik siswa.